

LAPORAN

Hibah Kompetitif Penelitian Sesuai Prioritas Nasional Batch II

Tahun Anggaran 2009



Tema:

Ketahanan Pangan

JUDUL PENELITIAN:

Penyusunan Model Kebijakan Stabilitas Harga dan Ketersediaan Pasokan
Kedelai Di Indonesia

Drs.Ec. Tri Haryanto, MP

Dra. Dyah Wulan Sari M. Ec.Dev

Drs. Ec. Eko Afiatno M.SE

Dibiayai Oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan
Nasional, sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Hibah Kompetitif Penelitian
Sesuai Prioritas Nasional

Nomer : 300/SP2H/PP/DP2M/VII/2009, Tanggal 30 Juni 2009

Universitas Airlangga

Desember 2009

FOOD SUPPLY

Ekonomi

LAPORAN

Hibah Kompetitif Penelitian Sesuai Prioritas Nasional Batch II

Tahun Anggaran 2009

kk2
kk B
LP. 18, 11
Har
?



Tema:

Ketahanan Pangan

JUDUL PENELITIAN:

Penyusunan Model Kebijakan Stabilitas Harga dan Ketersediaan Pasokan
Kedelai Di Indonesia

Drs.Ec. Tri Haryanto, MP

Dra. Dyah Wulan Sari M. Ec.Dev

Drs. Ec. Eko Afiatno M.SE

Dibiayai Oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan
Nasional, sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Hibah Kompetitif Penelitian
Sesuai Prioritas Nasional

Nomer : 300/SP2H/PP/DP2M/VII/2009, Tanggal 30 Juni 2009

Universitas Airlangga

Desember 2009

LEMBAR PENGESAHAN

1. Judul : Penyusunan Model Kebijakan Stabilitas Harga dan Ketersediaan Pasokan Kedelai di Indonesia
2. Ketua Peneliti :
- a. Nama Lengkap : Drs. Ec. Tri Haryanto, MP
- b. Jenis Kelamin : Laki-laki
- c. NIP : 132 056 927
- d. Pangkat/ Gol : Lektor Kepala/IIID
- e. Jabatan : Ketua Departemen Ilmu Ekonomi Universitas Airlangga
- f. Bidang Keahlian : Ekonomi Pertanian
- g. Fakultas/ Jurusan/ Puslit : Ekonomi/ Ilmu Ekonomi
- h. Perguruan Tinggi : Universitas Airlangga

Tim Peneliti:

No	NAMA PENELITI	BIDANG KEAHLIAN	FAKULTAS/ JURUSAN	PERGURUAN TINGGI
1	Drs.Ec Tri Haryanto, MP	Ekonomi Pertanian	Ekonomi/ Ilmu Ekonomi	Universitas Airlangga
2	Dra. Ec. Dyah Wulan Sari M. Ec.Dev	Ekonomi Pembangunan	Ekonomi/ Ilmu Ekonomi	Universitas Airlangga
3	Drs.Ec. Bambang Eko Afiatno, M.SE	Ekonomi Pembangunan	Ekonomi/ Ilmu Ekonomi	Universitas Airlangga

3. Pendanaan dan Jangka Waktu Penelitian:

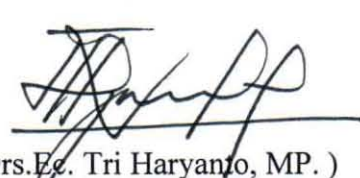
- a. Jangka Waktu Penelitian Yang Diusulkan : 3 Tahun
- b. Biaya yang Diusulkan : Rp. 100.000.000
- c. Biaya yang Disetujui : Rp. 60.000.000

Surabaya, 27 Nopember 2009

Mengetahui
Dekan/ Pusat Penelitian


(Drs.Ec. Karjadi Mintaroem, M.S)
NIP: 130 517 150

Ketua Peneliti



(Drs.Ec. Tri Haryanto, MP.)
NIP: 132 056 927

Mengetahui
Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Kepada Masyarakat


Prof. Dr. Bambang Sektiari Lukiswanto, DE.A, drh
NIP: 131 837 004

Berdasarkan Uji Kausalitas Granger menunjukkan adanya hubungan *Interdependence* dan *Unidirectional causality from P to F*. hubungan *Interdependence* terdapat pada harga kedelai dan bea masuk. Sedangkan hubungan *Unidirectional causality from P to F* ditemukan pada harga kedelai dan PPh impor serta harga kedelai dan subsidi. Artinya, PKS_H yang dikeluarkan oleh pemerintah adalah kebijakan yang bersifat reaktif. Pemerintah baru mengeluarkan PKS_H setelah terjadi kenaikan harga kedelai.

Tidak semua variabel PKS_H (Bea Masuk, PPh impor, dan subsidi) mempunyai pengaruh terhadap variabel harga kedelai . Hanya variabel Bea Masuk dan PPh Impor yang mempunyai pengaruh dalam jangka pendek dan jangka panjang terhadap harga kedelai. Akan tetapi kedua PKS_H tersebut tidak dapat menurunkan harga kedelai. Sedangkan subsidi tidak mempunyai pengaruh baik dalam jangka panjang maupun dalam jangka pendek terhadap harga kedelai. Hal ini menunjukkan bahwa PKS_H yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak efektif karena tidak dapat menurunkan harga kedelai. Dan Harga kedelai keseimbangan pada jangka pendek saat diterapkan PKS_H adalah berkisar Rp 8.445,00. Sedangkan harga kedelai keseimbangan pada jangka panjang adalah Rp. 9238,00. Keseimbangan kuantitas jangka panjang dihasilkan 4.221.430 Ton

PRAKATA

Assalammua'alaikum Wr. Wb

Dalam rangka stabilisasi harga kedelai dan produk turunannya maka pada tahun 2008 pemerintah mengeluarkan paket kebijakan stabilitas harga (PKSH). Ada tiga kebijakan PKSH, diantaranya adalah penurunan Bea Masuk, penurunan PPh impor, dan subsidi kedelai. Berdasarkan PMK nomor 1/PMK.011/2008, impor kacang kedelai dikenakan tarif Bea Masuk sebesar 0% dari yang semula sebesar 5%. Selanjutnya Berdasarkan PMK nomor 25/PMK.03/2008, besarnya PPh pasal 22 impor atas impor kedelai menjadi 0,5% dari yang semula 2,5%. Sedangkan untuk subsidi, akan diberikan subsidi sebesar Rp1.000,00 per kilogram bagi pengrajin tahu dan tempe selama enam bulan. Dalam rangka penyesuaian penyusunan kebijakan tersebut, penulis melaksanakan penelitian berjudul “ Penyusunan Model Kebijakan Stabilitas Harga dan Ketersediaan Pasokan Kedelai di Indonesia”. yang bertujuan untuk mengevaluasi efektifitas penetapan kebijakan tersebut. Serta untuk mengestimasi keseimbangan harga dan kuantitas kedelai dalam negeri.

Penelitian ini ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam perencanaan penyusunan strategi dan perencanaan penetapan kebijakan stabilisasi harga komoditi khususnya komoditi pangan. Kami menyadari sepenuhnya penelitian ini masih perlu penyempurnaan, oleh karena itu kami mengharapkan partisipasi pembaca untuk memberikan masukan demi perbaikan di masa yang akan datang.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan sehingga pelaksanaan penelitian ini dapat berjalan dengan baik dan semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

DAFTAR ISI

RINGKASAN DAN SUMMARY	i
PRAKATA	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	
DAFTAR GAMBAR	
DAFTAR LAMPIRAN	
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2. RUMUSAN MASALAH	3
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	5
2.1 Teori Permintaan Agregate dan Penawaran Agregate	5
2.2 Dampak Pemberlakuan Tarif terhadap Permintaan dan Penawaran	11
2.3 Pengaruh Konsumsi Bersubsidi terhadap Permintaan dan Penawaran	11
2.4 Kebijakan Fiskal	12
2.5 Kebijakan Perpajakan Secara Umum	13
2.6 subsidi	15
2.7 Paket Kebijakan Stabilisasi Harga (PKSH) Pada Komoditi Kedelai	18
2.8 Transmisi PKSH pada Komoditi Kedelai	19
BAB 3. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN TAHUN KE-1	23
BAB 4. METODOLOGI PENELITIAN	24
4.1 Pendekatan Penelitian	24
4.2 Identifikasi Variabel	24
4.3 Definisi Operasional	24
4.5 Teknik Analisis	25

BAB 5 HASIL DAN PEMBAHASAN		32
5.1 GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN		32
5.1.1. Perkembangan Harga Kedelai Domestik		32
5.1.2 Perkembangan Luas Lahan Kedelai		33
5.1.3 Perkembangan Pasokan Kedelai Domestik dan Kedelai Impor		34
5.1.4 Perkembangan Konsumsi dan Produksi Kedelai Dalam Negeri		35
5.2 Hasil dan Pembahasan		37
5.2.1. Uji Stasioneritas Data pada Variabel PKSH dan Kedelai		37
5.2.2 Penentuan Lag Optimal pada Model PKSH dan Harga Kedelai		38
5.2.3 Hasil Kausalitas <i>Granger</i>		39
5.2.4 Estimasi Pengaruh PKSH terhadap Harga Kedelai		40
5.2.5 Estimasi Kuantitas Produksi Equilibrium Kedelai		44
5.2.4 Pembahasan		44
BAB 6 KESIMPULAN DAN SARAN		48
6.1 Kesimpulan		48
6.2 Saran		48
Daftar Pustaka		50

DAFTAR TABEL

Tabel 5.1	Hasil Uji ADF: pada Level	37
Tabel 5.2	Hasil Uji ADF: pada <i>First Difference</i>	38
Tabel 5.3	Hasil Pengujian Lag Optimal	39
Tabel 5.4	Hasil Uji Kausalitas Granger	39
Tabel 5.5	Hasil Uji Estimasi Pengaruh Bea Masuk dan Harga Kedelai	41
Tabel 5.6	Hasil Uji Estimasi Pengaruh PPh Impor dan Harga Kedelai	42
Tabel 5.7	Hasil Uji Estimasi Pengaruh Subsidi dan Harga Kedelai	43
Tabel 5.8	Keseimbangan Harga Jangka Panjang dan Jangka Pendek	43
Tabel 5.9	Hasil Estimasi Harga dan Kuantitas Produksi Kedelai Dalam Negeri	44
Tabel 5.10	Hubungan Kausalitas antara PKSH dan Harga Kedelai	45

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Penurunan Kurva IS dari Persamaan produksi dan Permintaan Barang	6
Gambar 2.2	Penurunan Kurva LM dari Penawaran Uang dan Permintaan Uang	7
Gambar 2.3	Peregseran Kurva AD Akibat Kebijakan yang Ekspansif	8
Gambar 2.5	Kurva Penawaran Agregate Jangka Panjang	9
Gambar 2.6	Kurva Penawaran Agregate Jangka Pendek	9
Gambar 2.7	Pergeseran Kurva AS	10
Gambar 2.8	Dampak Pemberlakuan Tarif	11
Gambar 2.9	Pengaruh Konsumsi Bersubsidi	12
Gambar 2.10	Pengaruh Produksi Bersubsidi	12
Gambar 2.11	Transmisi Paket Kebijakan Stabilitas Harga Pada Komoditi Kedelai	20

DAFTAR GRAFIK

Grafik 5.1	Perkembangan Luas Harga Kedelai	33
Grafik 5.2	Perkembangan Luas Lahan Kedelai	34
Grafik 5.3	Pasokan Kedelai Domestik dan Kedelai Impor	34
Grafik 5.4	Konsumsi Kedelai	36

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Ketahanan pangan merupakan hal penting yang sangat berpengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan. Ketersediaan pangan salah satunya kedelai dengan harga yang terjangkau telah menjadi tujuan utama kebijakan pembangunan pertanian di Indonesia. Kebijakan pertanian dikembangkan dalam rangka (1) memantapkan ketahanan pangan, 2) meningkatkan pendapatan petani dan penduduk pedesaan, 3) mengentaskan kemiskinan, 4) memasok tenaga kerja yang berkualitas 5) memacu pertumbuhan ekonomi, dan 6) menyetatkan ekonomi (Simatupang et al., 2002).

Di Indonesia, tanaman kedelai merupakan tanaman pangan terpenting setelah padi dan jagung (Nurasa, 2007). Komoditas ini diperlukan untuk meningkatkan gizi masyarakat karena kaya kandungan protein, aman dikonsumsi serta harganya yang terjangkau. Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk, meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan, kenaikan pendapatan serta kenaikan permintaan untuk industri seperti tahu, tempe, kecap, susu kedelai dan tauco, maka dari tahun ke tahun permintaan komoditas kedelai terus mengalami peningkatan.

Tingginya permintaan kedelai yang tidak diiringi dengan kenaikan jumlah produksi kedelai menyebabkan timbulnya masalah ketersediaan kedelai. Buruknya kinerja produksi dan produktivitas kedelai serta lemahnya kinerja perdagangan dan tata niaga kedelai cukup berkontribusi terhadap krisis kedelai di Indonesia. Selain itu, pertumbuhan produksi yang lebih lambat dibanding konsumsi semakin memperburuk ketersediaan kedelai di Indonesia. Kesenjangan produksi dan konsumsi ini makin nyata karena kedelai juga merupakan bahan baku industri dan pakan. Hal ini mencerminkan bahwa kebutuhan permintaan akan kedelai dipenuhi dengan mendatangkan kedelai impor.

Salah satu konsekuensi ketika suatu perekonomian melakukan import atas suatu barang atau jasa adalah setiap terjadi guncangan harga pada pasar internasional, maka akan mempengaruhi tingkat harga domestik. Salah satu guncangan eksternal yang cukup berpengaruh signifikan adalah kenaikan harga kedelai internasional. Perkembangan harga kedelai internasional dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2008 menunjukkan trend yang meningkat. Selama tahun 2006, harga kedelai internasional berada pada kisaran Rp. 3.807.00

sampai dengan Rp. 4.241,00. Pada tahun 2007, harga kedelai mengalami peningkatan dengan harga berkisar antara Rp. 3.868,00 hingga Rp. 5.215,00. Selanjutnya pada tahun 2008 harga kedelai internasional mengalami peningkatan yang cukup signifikan, yaitu dengan harga berkisar antara Rp. 6.160,00 hingga Rp. 7.266,00. Kenaikan harga kedelai internasional juga di ikuti dengan kenaikan harga kedelai domestik. Di Indonesia, harga kedelai pada tahun 2008 berkisar antara Rp. 7.513 hingga Rp. 8.597 perkilogram.

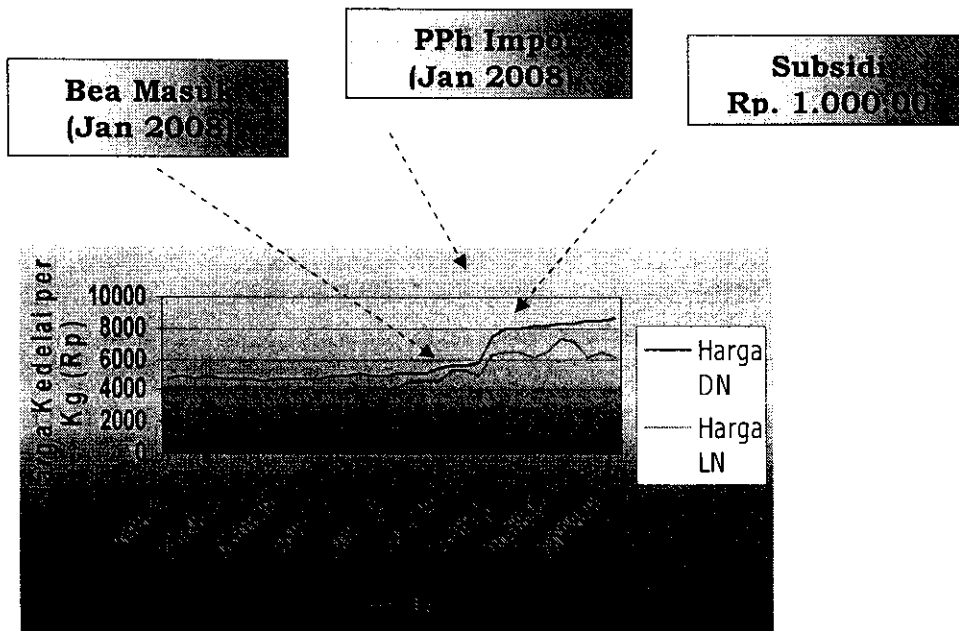
Dalam rangka stabilisasi harga kedelai dan produk turunannya maka pada tahun 2008 pemerintah mengeluarkan paket kebijakan stabilitas harga (PKSH). Ada tiga kebijakan PKSH, diantaranya adalah penurunan Bea Masuk, penurunan PPh impor, dan subsidi kedelai. Berdasarkan PMK nomor 1/PMK.011/2008, impor kacang kedelai dikenakan tarif Bea Masuk sebesar 0% dari yang semula sebesar 5%. Selanjutnya Berdasarkan PMK nomor 25/PMK.03/2008, besarnya PPh pasal 22 impor atas impor kedelai menjadi 0,5% dari yang semula 2,5%. Sedangkan untuk subsidi, akan diberikan subsidi sebesar Rp1.000,00 per kilogram bagi pengrajin tahu dan tempe selama enam bulan.

Namun demikian, meskipun pemerintah telah mengeluarkan Paket Kebijakan Stabilitas Harga (PKSH), namun harga kedelai beserta produk turunannya terus mengalami kenaikan. Perbandingan harga kedelai domestik dan internasional dapat dilihat pada gambar 1.1 dibawah ini. Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa perbedaan harga kedelai domestik dan internasional berfluktuatif. Dengan harga kedelai dalam negeri lebih tinggi jika dibandingkan harga kedelai internasional. Pada tahun 2006 perbedaan harga kedelai domestik dengan harga internasional berkisar antara Rp 404,00 sampai Rp 916,00. Sedangkan pada tahun 2007 perbedaan harga ini menjadi sekitar Rp 323,00 sampai Rp 1.016,00. Pada bulan januari 2008 perbedaan harga kedelai dalam negeri dan luar negeri sebesar Rp 1.160,00. Pada periode ini pemerintah menetapkan penurunan bea masuk dari 5% menjadi 0% serta kebijakan penurunan PPh Impor dari 2,5% menjadi 0,5%. Akan tetapi sejak Pebruari tahun 2008 perbedaan 962,00 sampai Rp 2.460,00. Sejak bulan April, Juli, sampai Oktober pemerintah menetapkan kebijakan pemberian subsidi Rp 1.000,00 kepada para pengrajin tempe/tahu. Perbandingan harga tersebut dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut.

Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian ini sangat penting untuk dilakukan dalam rangka mengevaluasi paket kebijakan stabilitas harga kedelai yang sudah berjalan baik secara kuantitatif maupun kualitatif, mengevaluasi dan menemukan solusi terhadap masalah kelangkaan dan fluktuasi harga kedelai sehingga dapat dirumuskan suatu rekomendasi

kebijakan pada komoditi kedelai dalam rangka ketahanan pangan nasional serta memproyeksi harga kedelai yang ideal.

Gambar 1.1
Perbandingan Harga Kedelai Dalam Negeri dan Internasional



1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar di belakang di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi paket kebijakan stabilitas harga (PKSH) 2008 yang sudah dilaksanakan pemerintah pada komoditas kedelai dan produk turunannya melalui pendekatan kuantitatif. Paket Kebijakan yang akan dievaluasi meliputi kebijakan Bea Masuk, PPh impor, dan subsidi kedelai. Berikut adalah rumusan masalah yang akan menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini:

1. Apakah ada hubungan kausalitas antara variabel Paket Kebijakan Stabilitas Harga (Bea Masuk, PPh impor, dan subsidi) dan variabel harga kedelai ?
2. Apakah ada pengaruh antara variabel Paket Kebijakan Stabilitas Harga (Bea Masuk, PPh impor, dan subsidi) terhadap variabel harga baik dalam jangka panjang maupun dalam jangka pendek ?
3. Berapakah keseimbangan harga kedelai domestik?
4. Berapakah keseimbangan kuantitas kedelai domestik?

1.3 Tujuan

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, secara umum tujuan dari penelitian ini adalah: Melihat dan mengukur dampak kebijakan fiskal dalam mempengaruhi stabilitas harga kebutuhan pokok atas komoditi kedelai dan produk turunannya, antara lain;

1. Menguji hubungan kausalitas antara variabel variabel Paket Kebijakan Stabilitas Harga (Bea Masuk, PPh impor, dan subsidi) dan variabel harga kedelai .
2. Menguji pengaruh antara variabel Paket Kebijakan Stabilitas Harga (Bea Masuk, PPh impor, dan subsidi) terhadap variabel harga baik dalam jangka panjang maupun dalam jangka pendek
3. Memprediksi keseimbangan harga kedelai domestik.
4. Memprediksi keseimbangan kuantitas kedelai domestik .

1.4. Manfaat

Manfaat yang diharapkan dari mengevaluasi kebijakan fiskal atas komoditi kedelai beserta komoditi turunannya adalah memberikan masukan bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan fiskal selanjutnya yang tepat sasaran. Utamanya dalam rangka menjaga kestabilan harga produk kebutuhan pokok dan harga produk-produk turunannya serta ketersediaannya.

BAB II

STUDI PUSTAKA

2.1 Teori Permintaan Agregat dan Penawaran Agregat

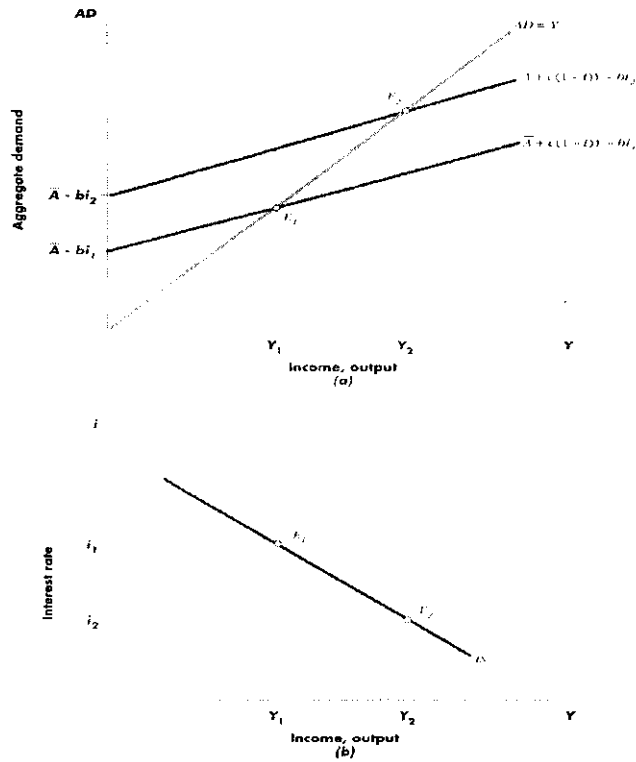
Model permintaan dan penawaran agregat menunjukkan tentang penawaran dan permintaan untuk setiap barang, serta bagaimana pergeseran dalam penawaran dan permintaan ini mempengaruhi harga serta jumlahnya. Model ini juga memberikan cara untuk membedakan bagaimana kinerja perekonomian dalam jangka panjang dan dalam jangka pendek.

Kurva permintaan agregat AD menunjukkan hubungan antara tingkat harga P dengan barang yang diminta Y . kurva permintaan agregat miring kebawah, semakin tinggi tingkat harga P maka akan semakin rendah tingkat keseimbangan riil, dan karena itu semakin rendah jumlah barang dan jasa yang diminta. Permintaan agregat (AD) terbentuk melalui dua kurva yaitu kurva IS dan juga kurva LM. Kurva IS adalah kurva yang mencerminkan kondisi di pasar barang sedangkan LM adalah menunjukkan kondisi pada pasar uang (Blanchard, 2006: 47). Menurut Dornbusch (2001:212-235), keseimbangan di pasar barang harus menggambarkan bahwa produksi sama dengan permintaan barang. Persamaan produksi sama dengan permintaan barang dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$Y = C(Y-T) + I(Y,r) + G + X(Y^*,\epsilon) - M(Y,\epsilon) \dots \dots \dots 2.1$$

Produksi = Permintaan Barang

Persamaan di atas menggambarkan hubungan antara output (Y), konsumsi (C) yang merupakan fungsi pendapatan (Y) dan pajak (T), pengeluaran investasi (I) yang merupakan fungsi pendapatan dan tingkat bunga (r), pengeluaran pemerintah (G), ekspor (X) fungsi pendapatan luar negeri (Y^*) dan nilai tukar riil (ϵ) dan impor (M) fungsi pendapatan dan nilai tukar riil. Keseimbangan di pasar barang harus menggambarkan bahwa sisi kiri persamaan (produksi) harus sama dengan sisi kanan persamaan (permintaan untuk barang). Dari persamaan di atas dapat diturunkan kurva IS. Posisi equilibrium dalam pasar barang yang mengindikasikan bahwa peningkatan tingkat bunga membuat output berkurang. Hubungan ini menunjukkan bahwa kurva IS memiliki slope negatif (*downward-sloping*), seperti terlihat pada Gambar 2.1.



Sumber: Blanchard, 2006: 92

Gambar 2.1.

Penurunan Kurva IS dari Persamaan Produksi dan Permintaan Barang

Sedangkan keseimbangan di pasar uang dapat diturunkan dari permintaan dan penawaran uang. Permintaan uang dihitung melalui persamaan berikut:

$$M^d = \$Y L(r) \tag{-} \dots\dots\dots 2.2$$

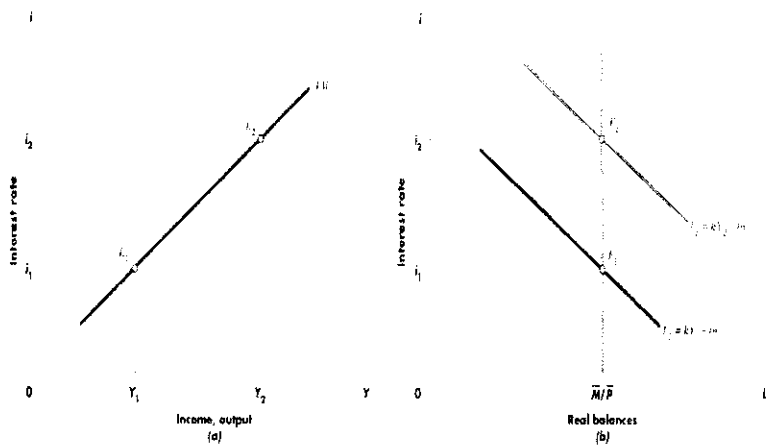
Dimana, M^d adalah permintaan untuk uang, $\$Y$ menunjukkan *nominal income*. Permintaan uang M^d sama dengan *nominal income* suatu waktu tertentu yang dipengaruhi oleh fungsi tingkat bunga (r), fungsinya ditunjukkan oleh $L(r)$. Tanda negatif di bawah (r) dalam $L(r)$ menunjukkan tingkat bunga memiliki efek negatif pada permintaan uang. Peningkatan bunga (r) mengurangi permintaan uang karena masyarakat menyimpan kekayaannya dalam obligasi. Keseimbangan dalam pasar uang didapat dari penawaran uang sama dengan permintaan uang, $M^s = M^d$. Dari persamaan permintaan uang sebelumnya dapat ditulis:

$$\text{Money supply} = \text{Money demand}$$

$$M = PYL(r) \dots\dots\dots 2.3$$

Persamaan di atas dapat diartikan pada suatu tingkat bunga (r) dan pendapatan masyarakat \$ Y , keinginan untuk memegang pada masyarakat sama dengan tingkat penawaran uang M . Keseimbangan di atas dikatakan hubungan LM. Penurunan kurva LM dari keseimbangan di pasar uang dapat dilihat pada Gambar 2.2.

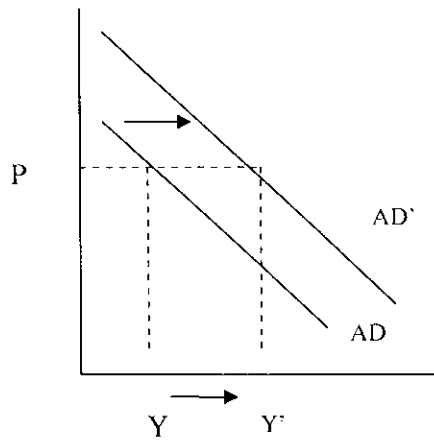
Gambar 2.2.
Penurunan Kurva LM dari Penawaran Uang dan Permintaan Uang



Sumber:Blanchard,(2006:3)

Dari kurva IS-LM diatas dapat diturunkan Kurva Permintaan Aggregate (AD). Sehingga pergeseran kurva AD disebabkan karena adanya ekspansi/kontraksi suatu kebijakan. Kebijakan ekspansi seperti halnya kenaikan pengeluaran pemerintah, penurunan pajak, kenaikan jumlah uang beredar ataupun penurunan tingkat bunga. Kebijakan ini akan mengeser kurva AD ke arah kanan, yaitu dari AD ke AD' seperti yang ditunjukkan pada gambar 2.3. di bawah ini.

Gambar 2.3.
Pergeseran Kurva AD Akibat Kebijakan yang Ekspansif

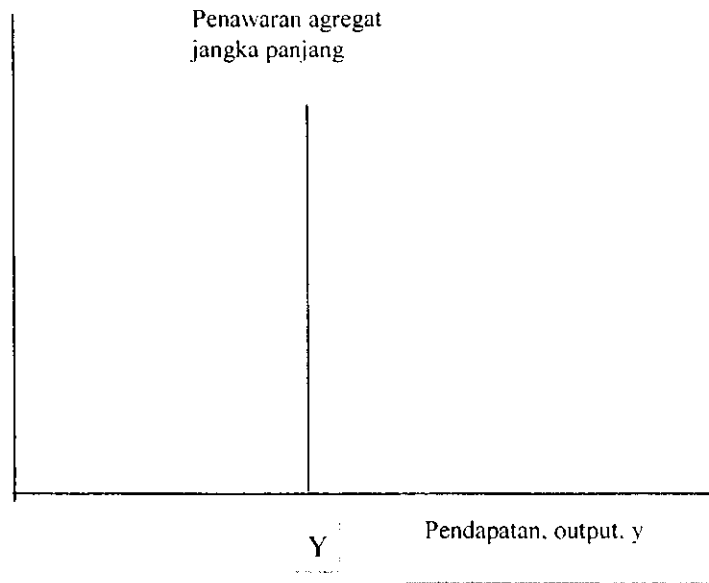


Sumber : Mankiw, (2003:287)

Penawaran agregat (*aggregate supply, AS*) adalah hubungan antara jumlah barang dan jasa yang ditawarkan dan tingkat harga agregat. Hubungan penawaran agregat bergantung pada horizon waktu, Karena seorang produsen yang menawarkan barang memiliki harga yang fleksibel dalam jangka panjang tetapi harga yang kaku dalam jangka pendek.

Dalam jangka panjang, tingkat output ditentukan oleh jumlah modal dan tenaga kerja serta ketersediaan teknologi, tingkat output tidak bergantung pada tingkat harga, maka dari itu kurva penawaran agregat jangka panjang adalah vertikal. Perpotongan antara kurva permintaan agregat dengan kurva penawaran agregat vertikal menentukan tingkat harga.

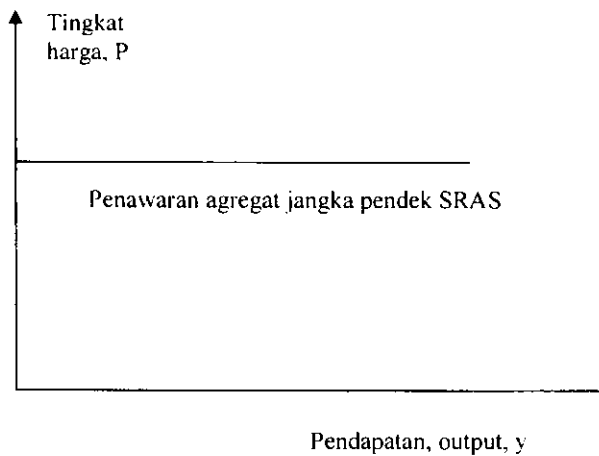
Gambar 5. Kurva penawaran agregat jangka panjang



Sumber : N. Gregory Mankiw, edisi ke-5, Teori Makro Ekonomi, Erlangga, Jakarta, 2003 : 239

Sedangkan dalam jangka pendek kurva penawaran agregat adalah horizontal karena seluruh harga tetap dalam jangka pendek.

Gambar 6. Kurva penawaran agregat jangka pendek

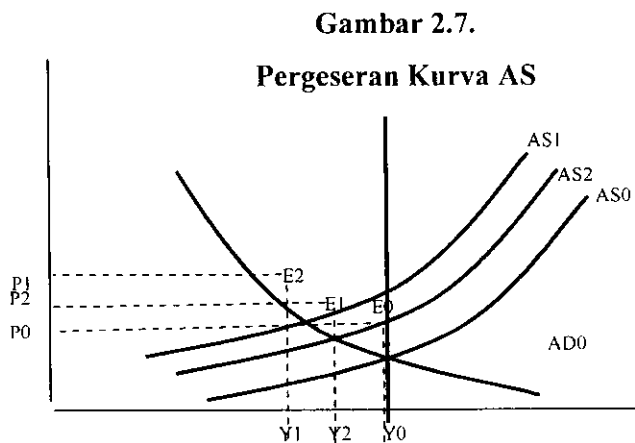


Sumber : N. Gregory Mankiw, edisi ke-5, Teori Makro Ekonomi, Erlangga, Jakarta, 2003 : 241

Jadi Mankiw menyimpulkan bahwa dalam jangka panjang, harga-harga adalah fleksibel, kurva penawaran agregat adalah vertikal, dan perubahan permintaan agregat akan mempengaruhi tingkat harga tetapi tidak mempengaruhi output. Sedangkan dalam jangka pendek, harga-harga adalah kaku, kurva penawaran agregat adalah datar, dan perubahan permintaan agregat akan mempengaruhi output barang dan jasa perekonomian. (Mankiw, 2003)

Pergeseran kurva penawaran agregat dapat disebabkan oleh adanya masalah yang dapat menyebabkan terjadinya stagflasi. Menurut Sukirno (2004:350), apabila timbul salah satu masalah yang dapat menyebabkan terjadinya stagflasi seperti adanya kenaikan harga barang impor dapat menggeser kurva penawaran agregat. Dampak yang diakibatkan dari kenaikan harga barang impor akan menggeser kurva penawaran agregat ke kiri yaitu dari AS_0 menjadi AS_1 seperti pada gambar 2.4. Selain itu, dampak dari perubahan tersebut merubah keseimbangan dari E_0 menjadi E_1 , menyebabkan pendapatan nasional riil menurun dari Y_0 ke Y_1 , dan tingkat harga meningkat dari P_0 menjadi P_1 .

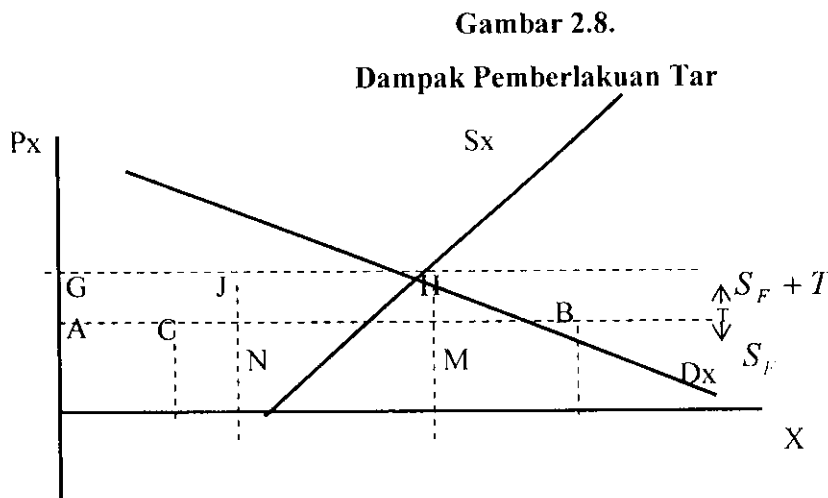
Untuk mengatasi masalah tersebut pemerintah menjalankan kebijakan segi penawaran yaitu dengan melakukan langkah-langkah yang menurunkan biaya produksi perusahaan dan menggalakkan perkembangan teknologi. Menurunkan biaya produksi perusahaan dapat dilakukan dengan cara mengurangi pajak. Langkah-langkah pemerintah dalam menurunkan pajak tersebut akan menggeser kurva penawaran agregat ke kanan, misalnya dari AS_1 menjadi AS_2 . keseimbangan baru dicapai di E_2 dengan tingkat harga P_2 dan pendapatan nasional Y_2 .



Sumber: Sukirno, Sadono: 2004

2.2 Dampak Pemberlakuan Tarif terhadap Permintaan dan penawaran

Dengan adanya tarif atau pajak yang dikenakan pada suatu komoditi yang diperdagangkan lintas batas teritorial akan menyebabkan terjadinya perubahan terhadap penawaran dan permintaan akan barang tersebut. Berdasarkan gambar 2.5 dapat dilihat dampak dari adanya tarif terhadap penawaran dan permintaan. Dengan adanya penurunan tarif dari $S_F + T$ menjadi S_F menyebabkan terjadinya kenaikan permintaan dari titik H ke titik B. Selain itu, dengan adanya penurunan dari $S_F + T$ menjadi S_F menyebabkan terjadinya penurunan terhadap penawaran dari titik J ke titik C.

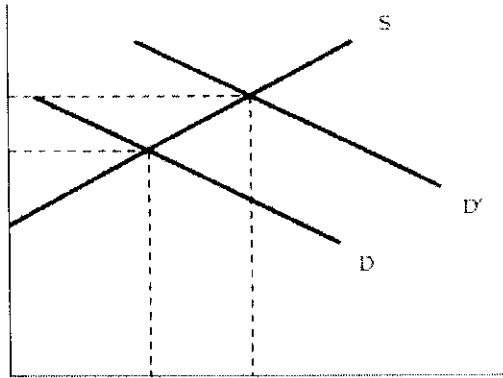


Salvatore (1997:274)

2.3 Pengaruh Konsumsi dan Produksi Bersubsidi terhadap Permintaan dan Penawaran

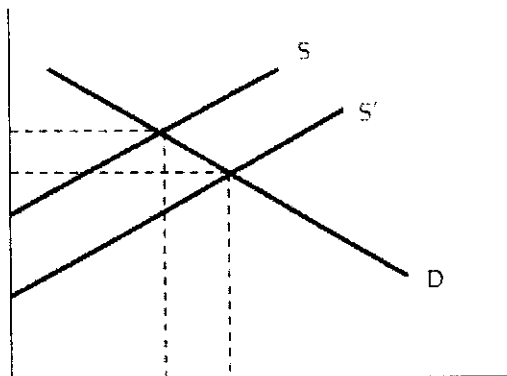
Kita harus memperhatikan elastisitas kurva permintaan dan penawaran dalam menentukan biaya total subsidi. Subsidi akan menggeser kurva permintaan ke atas untuk konsumsi bersubsidi (*subsidized consumption*) atau kurva penawaran ke bawah untuk produksi bersubsidi (*subsidized production*). Hasil dari kedua jenis subsidi ini adalah ekuilibrium kuantitas baru yang lebih besar (Wikipedia, 12 September 2005). Pengaruh kedua jenis subsidi ini pada kurva permintaan dan penawaran dapat dilihat pada Gambar 2.6 dan 2.7. Pada Gambar 2.6 konsumsi bersubsidi menggeser kurva permintaan D ke atas menjadi kurva permintaan D'. Sedangkan produksi bersubsidi menggeser kurva penawaran S ke bawah menjadi kurva penawaran S'.

Gambar 2.8.
Pengaruh Konsumsi Bersubsidi



Sumber : Handoko, R dan Patriadi (2005)

Gambar 2.9.
Pengaruh Produksi Bersubsidi



Sumber : Handoko, R dan Patriadi (2005)

2.4 Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal merupakan salah satu instrumen selain kebijakan moneter yang digunakan dalam mencapai *Goal Targetting* yaitu *Social Welfare*. Kebijakan fiskal ini digunakan oleh otoritas fiskal untuk mempengaruhi variabel ekonomi makro melalui pajak dan pengeluaran pemerintah. Menurut Case dan Fair (2007: 404) mendefinisikan kebijakan fiskal sebagai pilihan dari pemerintah dalam menentukan tingkat atau level dari penerimaan

dan pengeluaran. Blanchard (2006:90) menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah ini memiliki korelasi positif dengan output (pendapatan), sedangkan pajak memiliki korelasi yang negatif.

Selain itu Kebijakan Fiskal juga bisa didefinisikan sebagai suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan ini mirip dengan kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar, namun kebijakan fiskal lebih menekankan pada pengaturan pendapatan dan belanja pemerintah.

Instrumen kebijakan fiskal adalah penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang berhubungan erat dengan pajak. Dari sisi pajak jelas jika mengubah tarif pajak yang berlaku akan berpengaruh pada ekonomi. Jika pajak diturunkan maka kemampuan daya beli masyarakat akan meningkat dan industri akan dapat meningkatkan jumlah output. Dan sebaliknya kenaikan pajak akan menurunkan daya beli masyarakat serta menurunkan output industri secara umum. (Anggito Abimanyu, 2008)

Perumusan suatu kebijakan fiskal dapat dilakukan melalui beberapa tahapan. Menurut Nazier (dalam Subiyantoro, 2004:456-457) ada beberapa hal yang dapat dilakukan dalam perumusan kebijakan fiskal. Pertama, Masalah Kebijakan (*Policy Problem*), yaitu berkaitan dengan keadaan di mana ada masalah pada kebijakan yang sedang berjalan. Sehingga perlu adanya identifikasi masalah dan peluang yang tepat sehingga tidak terjadi kesalahan dalam penentuan kebijakan. Kedua, Alternatif Kebijakan (*Policy Alternatives*), yaitu mengenai potensi-potensi dan tindakan yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah kebijakan yang ada. Ketiga, Pelaksanaan Kebijakan (*Policy Action*), yaitu merupakan serangkaian langkah-langkah yang dipilih dan ditetapkan untuk dilakukan berdasarkan alternatif kebijakan. Keempat, Hasil Kebijakan (*Policy Outcomes*), yaitu merupakan hasil yang diperoleh dari pelaksanaan kebijakan. Kelima, Kinerja Kebijakan (*Policy Performances*), yaitu merupakan suatu tingkatan dimana hasil kebijakan memberikan kontribusi untuk mendapatkan nilai yang dicapai.

2.5 Kebijakan Perpajakan Secara Umum

Pajak adalah pembayaran wajib yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat (wajib pajak) untuk menutupi pengeluaran rutin negara dan biaya pembangunan tanpa balas jasa yang dapat ditunjuk secara langsung. Pengetian pajak menurut Prof. Dr. Adriani, pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan, yang terutang oleh wajib pajak

membayarnya menurut peraturan dengan tidak mendapat imbalan kembali yang dapat ditunjuk secara langsung. (tidak mendapat kompensasi langsung)

Sedangkan menurut Prof. DR. Rachmat Sumitro,SH pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari kas rakyat ke sector pemerintah berdasarkan undang-undang) dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal (tegen prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.

Lima unsur pokok dalam definisi pajak

- Iuran / pungutan
- Pajak dipungut berdasarkan undang-undang
- Pajak dapat dipaksakan
- Tidak menerima kontra prestasi
- Untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah

Penerimaan dari pajak digunakan untuk beberapa tujuan. Menurut Suparmoko (2003), Penerimaan dari pajak digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Dalam upaya meningkatkan penerimaan dari pajak, maka kebijakan perpajakan yang dilakukan harus berdasar pada 5 *prinsip* perpajakan. Pertama, efisiensi, yaitu Sistem pajak yang diberlakukan tidak menyebabkan distorsi dalam perekonomian, bahkan seharusnya mampu mendorong tercapainya alokasi sumberdaya yang efisien. Kedua, administrasi yang sederhana, yaitu sistem pajak yang diberlakukan mempunyai biaya yang rendah dalam pelaksanaan administrasi, dan memberikan kemudahan dalam pemenuhan kewajiban dan pengajuan pengaduan oleh wajib pajak. Ketiga, fleksibel, yaitu, sistem pajak yang diberlakukan mudah untuk dilakukan penyesuaian terhadap perubahan kondisi yang ada, baik kondisi ekonomi dan bukan ekonomi. Keempat, tanggung jawab politik, yaitu sistem pajak yang diberlakukan harus transparan. Dimana sistem pajak dirancang sedemikian sehingga wajib pajak dapat memastikan apa dan berapa yang mereka bayar, serta dapat melakukan evaluasi terhadap akurasi sistem pajak tersebut yang merupakan wujud preferensi wajib pajak. Kelima, Keadilan, yaitu sistem pajak yang diberlakukan harus bersifat adil, wajib pajak dengan kondisi yang sama akan dikenakan pajak yang sama. Kemudian wajib pajak yang mempunyai kemampuan menanggung beban pajak yang tinggi akan dikenakan pajak yang tinggi pula.

2.6 Subsidi

2.6.1 Pengertian Subsidi

Subsidi adalah pembayaran yang dilakukan pemerintah kepada perusahaan atau rumah tangga untuk mencapai tujuan tertentu yang membuat mereka dapat memproduksi atau mengkonsumsi suatu produk dalam kuantitas yang lebih besar atau pada harga yang lebih murah. Secara ekonomi, tujuan subsidi adalah untuk mengurangi harga atau menambah keluaran (output).

Kemudian menurut Suparmoko, subsidi (transfer) adalah salah satu bentuk pengeluaran pemerintah yang juga diartikan sebagai pajak negatif yang akan menambah pendapatan mereka yang menerima subsidi atau mengalami peningkatan pendapatan riil apabila mereka mengkonsumsi atau membeli barang-barang yang disubsidi oleh pemerintah dengan harga jual yang rendah. Subsidi dapat dibedakan dalam dua bentuk yaitu subsidi dalam bentuk uang (*cash transfer*) dan subsidi dalam bentuk barang atau subsidi innatura (*in kind subsidy*).

a. Subsidi dalam Bentuk Uang

Subsidi bentuk ini diberikan oleh pemerintah kepada konsumen sebagai tambahan penghasilan atau kepada produsen untuk dapat menurunkan harga barang. Seperti pemberian bantuan langsung tunai (BLT)

Keunggulan subsidi dalam bentuk uang kepada konsumen :

- a) Lebih murah bagi pemerintah daripada subsidi dalam bentuk penurunan harga
- b) Memberikan kebebasan dalam membelanjakannya

b. Subsidi dalam Bentuk Barang

Subsidi dalam bentuk barang adalah subsidi yang dikaitkan dengan jenis barang tertentu yaitu pemerintah menyediakan suatu jenis barang tertentu dengan jumlah yang tertentu pula kepada konsumen tanpa dipungut bayaran atau pembayaran dibawah harga pasar.

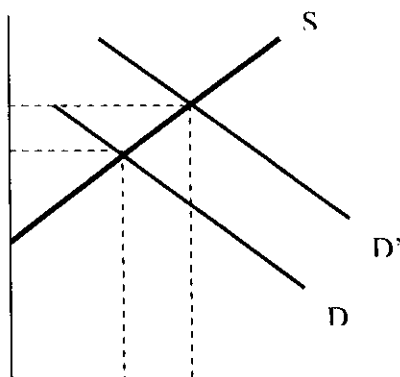
Pengaruh subsidi dalam bentuk barang adalah :

- 1) Mengurangi jumlah pembelian untuk barang yang disubsidi tetapi konsumsi total bertambah, misalkan pemerintah memberikan subsidi pangan tanpa harga dengan syarat konsumen tidak boleh menjual kembali barang tersebut.

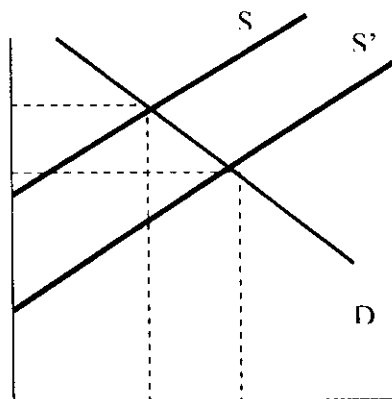
- 2) Tidak mengubah konsumsi total, hal ini terjadi jika pemerintah disamping memberikan subsidi juga menarik pajak yang sama besarnya dengan subsidi.
- 3) Konsumsi menjadi terlalu tinggi (*overconsumption*), hal ini terjadi jika jumlah yang disediakan oleh pemerintah lebih besar daripada jumlah sesungguhnya yang tersedia untuk dibeli konsumen.
- 4) Konsumsi menjadi terlalu rendah (*underconsumption*), hal ini terjadi kalau jumlah subsidi yang disediakan oleh pemerintah lebih kecil daripada jumlah yang diharapkan oleh konsumen. (M. Suparmoko, Keuangan Negara dalam Teori dan Praktik, 2003)

2.6.2 Subsidi dan Elastisitas

Kita harus memperhatikan elastisitas kurva permintaan dan penawaran dalam menentukan biaya total subsidi. Subsidi akan menggeser kurva permintaan ke atas untuk konsumsi bersubsidi (*subsidized consumption*) atau kurva penawaran ke bawah untuk produksi bersubsidi (*subsidized production*). Hasil dari kedua jenis subsidi ini adalah ekuilibrium kuantitas baru yang lebih besar. Pengaruh kedua jenis subsidi ini pada kurva permintaan dan penawaran dapat dilihat pada Gambar 8 dan 9. Pada Gambar 8 konsumsi bersubsidi menggeser kurva permintaan D ke atas menjadi kurva permintaan D'. Sedangkan produksi bersubsidi menggeser kurva penawaran S ke bawah menjadi kurva penawaran S'.

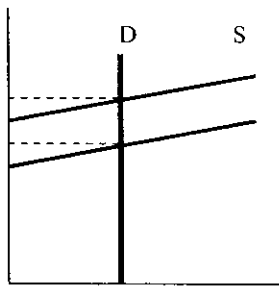


Gambar. 8 Pengaruh Konsumsi Bersubsidi

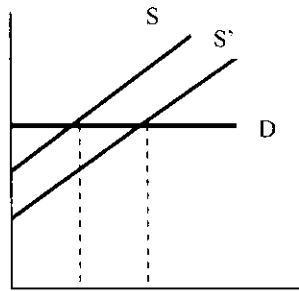


Gambar 9. Pengaruh Produksi

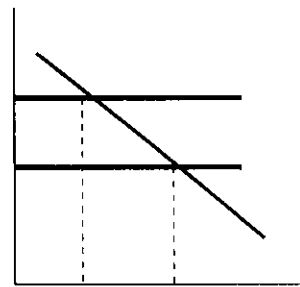
Pengaruh elastisitas kurva permintaan dan penawaran disajikan pada Gambar 10-12



Gambar 10. Pengaruh Subsidi pada *Perfectly Inelastic Demand*



Gambar 11. Pengaruh Subsidi pada *Perfectly elastic Demand*



Gambar 12. Pengaruh Subsidi pada *Perfectly Elastic Supply*

Sumber : Kajian Ekonomi dan Keuangan, vol 9, no.4, Desember 2005

Berdasarkan Gambar 8 s.d. 12 dapat disimpulkan bahwa semakin elastis kurva permintaan dan penawaran maka akan semakin besar kenaikan produksi akibat subsidi. Akan tetapi semakin elastis kurva permintaan dan penawaran maka pengurangan harga akibat subsidi akan semakin kecil.

2.6.3 Efek Subsidi

1. Efek positif subsidi

Kebijakan pemberian subsidi biasanya dikaitkan kepada barang dan jasa yang memiliki positif eksternalitas dengan tujuan agar untuk menambah output dan lebih banyak sumber daya yang dialokasikan ke barang dan jasa tersebut, misalnya pendidikan dan teknologi tinggi.

2. Efek negatif subsidi

Secara umum efek negatif subsidi adalah :

- a. Subsidi menciptakan alokasi sumber daya yang tidak efisien. Karena konsumen membayar barang dan jasa pada harga yang lebih rendah daripada harga pasar maka ada kecenderungan konsumen tidak hemat dalam mengkonsumsi barang yang disubsidi. Karena harga yang disubsidi lebih rendah daripada biaya kesempatan (opportunity cost) maka terjadi pemborosan dalam penggunaan sumber daya untuk memproduksi barang yang disubsidi.
- b) Subsidi menyebabkan distorsi harga.

Menurut Basri, subsidi yang tidak transparan dan tidak *well-targeted* akan mengakibatkan :

- a. Subsidi besar yang digunakan untuk program populis cenderung menciptakan distorsi baru dalam perekonomian
- b) Subsidi menciptakan suatu inefisiensi
- c) Subsidi tidak dinikmati oleh mereka yang berhak. (Fisal Basri, 2002)

2.7 Paket Kebijakan Stabilitas Harga (PKSH) pada Komoditi Kedelai

Dalam rangka menstabilkan harga kedelai dan produk turunannya pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Stabilitas Harga. Paket Kebijakan Stabilitas Harga tersebut meliputi penurunan Bea Masuk , penurunan PPh impor, dan pemberian subsidi.

1. Bea Masuk

Pengertian Bea Masuk (BM) atau *Impor Duty* adalah bea yang dikenakan atas barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean dan diperlakukan sebagai barang import. Bea Masuk ditetapkan dengan menggunakan Dasar Penghitungan Bea Masuk (DPBM) yang ditetapkan oleh peraturan Menteri Keuangan. Tujuan penetapan DPBM adalah untuk memperoleh kepastian dalam penghitungan besarnya tarif yang dikenakan atas barang impor.

Keputusan Menteri Keuangan No. 491/KMK.05/1996, Tgl. 31-07-1996 menjelaskan bahwa Bea Masuk dihitung berdasarkan tarif Bea Masuk dikalikan dengan Nilai Pabean barang impor yang bersangkutan. Tarif untuk penghitungan Bea Masuk didasarkan pada ketentuan tentang klasifikasi barang dan besarnya tarif Bea Masuk atas barang impor. Sedangkan nilai Pabean adalah untuk penghitungan Bea Masuk dan pajak dalam rangka impor .

Berdasarkan PMK nomor 1/PMK.011/2008, tarif Bea Masuk dari yang semula sebesar 5% dihapus menjadi 0%. Penghapusan Bea Masuk mulai berlaku pada tanggal 18 Januari 2008. Sedangkan berdasarkan SE Dirjen Bea Cukai nomor 07/2008, penghapusan Bea Masuk mulai berlaku pada tanggal 23 Januari 2008.

2. Pajak Penghasilan Pasal 22

Pajak Penghasilan pasal 22 adalah pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang, dan badan-badan tertentu baik badan pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan dibidang impor atau kegiatan usaha dibidang lain (Munawir, 2003:170).

Berdasarkan PMK nomor 25/PMK.03/2008, penurunan PPh impor dari 2,5% menjadi 0,5% mulai berlaku pada tanggal 4 Februari 2008.

3. Subsidi

Ada beberapa pengertian mengenai subsidi. Menurut Milton dan Orley (1993:464), subsidi adalah pembayaran yang dilakukan pemerintah kepada perusahaan atau rumah tangga untuk mencapai tujuan tertentu yang membuat mereka dapat memproduksi atau mengkonsumsi suatu produk dalam kuantitas yang lebih besar atau pada harga yang lebih murah. Secara ekonomi, tujuan subsidi adalah untuk mengurangi harga atau menambah keluaran atau *output*. Sedangkan menurut Suparmoko (2003:34), subsidi adalah salah satu bentuk pengeluaran pemerintah yang juga diartikan sebagai pajak negatif yang akan menambah pendapatan mereka yang menerima subsidi atau mengalami peningkatan pendapatan riil apabila mereka mengkonsumsi atau membeli barang-barang yang disubsidi oleh pemerintah dengan harga jual yang rendah.

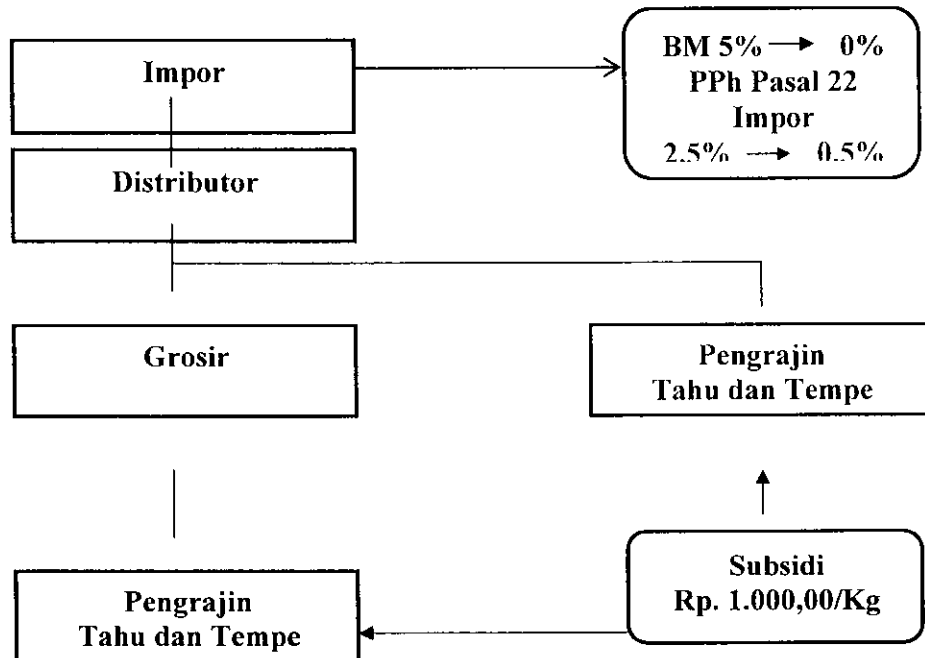
Penjualan bahan baku kedelai bersubsidi Rp 1000/kg diberikan kepada pengrajin tahu atau tempe selama 6 bulan. Dalam pelaksanaannya, pemberian subsidi kepada pengrajin tahu dan tempe telah dilaksanakan pada bulan April, Juli, Agustus, September, dan Oktober tahun 2008.

2.8 Transmisi Paket Kebijakan Stabilitas Harga (PKSH) Pada Komoditi Kedelai

PKSH yang dikenakan pada komoditi kedelai adalah bea masuk, PPh Impor, dan subsidi. Dari gambar 2.5 dapat dilihat bahwa pada saat impor kedelai pemerintah mengenakan bea masuk sebesar 0% dan PPh pasal 22 impor dengan tarif dari 2.5% menjadi 0,5%. Selain kebijakan bea masuk dan PPh Impor untuk menstabilkan harga pemerintah menetapkan kebijakan subsidi. Pemerintah memberikan subsidi sebesar Rp. 1000,00/kg. Subsidi ini diberikan pemerintah hanya kepada para pengrajin tempe atau tahu saja, baik yang membeli dari distributor atau dari grosir.

Gambar 2.9.

Transmisi Paket Kebijakan Stabilitas Harga Pada Komoditi Kedelai



Sumber: Departemen Keuangan, 2008

2.3. Hipotesis dan Model Analisis

2.3.1. Hipotesis

Berdasarkan uraian pada latar belakang dan teori-teori di atas maka hipotesis dalam penelitian ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu :

- Diduga terdapat adanya hubungan kausalitas antara variabel Paket Kebijakan Stabilitas Harga (Bea Masuk, PPh impor, dan subsidi) dan variabel harga kedelai.
- Diduga terdapat adanya pengaruh antara variabel Paket Kebijakan Stabilitas Harga (Bea Masuk, PPh impor, dan subsidi) terhadap variabel harga baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek.

2.3.2. Model Analisis

Model analisis yang dipakai dalam penelitian ada dua model. Pertama model kausalitas dan kedua model PKSH, dan ketiga model kuantitas. Model kausalitas digunakan untuk menganalisis hubungan dari variabel yang digunakan. Model PKSH digunakan untuk

menganalisis pengaruh dari variabel PKSH yang digunakan baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek sekaligus untuk memprediksi harga ideal. Model kuantitas digunakan untuk pengaruh dari variabel harga kedelai terhadap kuantitas kedelai baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek sekaligus untuk memprediksi kuantitas ideal. Persamaan dalam model adalah sebagai berikut :

1. Model kausalitas

$$\begin{aligned} \bullet F_t &= \alpha + \sum_{j=1}^n \beta_j F_{t-j} + \sum_{j=1}^n \gamma_j P_{t-j} + v_{1t} \\ \bullet P_t &= \alpha' + \sum_{j=1}^n \theta_j P_{t-j} + \sum_{j=1}^n \lambda_j F_{t-j} + v_{2t} \end{aligned}$$

Dimana:

F_t : Paket Kebijakan Stabilitas Harga pada periode ke t

P_t : Harga kedelai turunannya pada periode ke t

n : panjang lag

v_1, v_2 : *impulse* atau *innovation* atau *shock*

2. Model Pengaruh PKSH terhadap harga kedelai

$$Y = \delta \beta_0 + \delta \beta_1 X_t + (1 - \delta) Y_{t-1} + \delta u_t$$

Dimana:

Y : Harga Kedelai

X_t : PKSH periode ke t

Y_{t-1} : harga kedelai satu periode sebelumnya

$\delta, \beta_0, \beta_1, (1 - \delta)$: parameter

u_t : Standar eror

3. Estimasi Keseimbangan Harga Kedelai Domestik

$$Y_t^* = \beta_0 + \beta_1 X_t + u_t$$

Dimana :

Y_t^* : Harga kedelai equilibrium

X_t : PKSH pada periode t

4. **Estimasi Keseimbangan Kuantitas Kedelai Domestik**

$$Y_t^* = \beta_0 + \beta_1 X_t^* + u_t$$

Dimana :

Y_t^* : Kuantitas kedelai equilibrium

X_t^* : Harga kedelai equilibrium

BAB III

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini sangat penting untuk dilakukan dalam rangka mengevaluasi paket kebijakan stabilitas harga kedelai yang sudah berjalan baik secara kuantitatif maupun kualitatif, mengevaluasi dan menemukan solusi terhadap masalah kelangkaan dan fluktuasi harga kedelai sehingga dapat dirumuskan suatu rekomendasi kebijakan pada komoditi kedelai dalam rangka ketahanan pangan nasional serta memproyeksi harga kedelai yang ideal.

Adapun tujuan khusus dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menguji hubungan kausalitas antara variabel variabel Paket Kebijakan Stabilitas Harga (Bea Masuk, PPh impor, dan subsidi) dan variabel harga kedelai .

Dari hasil uji ini akan dapat diketahui hubungan yang terjadi antara PKS dengan harga kedelai. Apakah memiliki hubungan yang salaing mempengaruhi satu sama lain (*interdependence*), atau hubungan satu arah. Dari hubungan ini dapat dilihat apakah kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tersebut bersifat reaktif atau preventif.

2. Menguji pengaruh antara variabel Paket Kebijakan Stabilitas Harga (Bea Masuk, PPh impor, dan subsidi) terhadap variabel harga baik dalam jangka panjang maupun dalam jangka pendek

Dari hasil estimasi pengaruh PKSH terhadap harga kedelai, akan diketahui bagaimana pengaruh kebijakan terhadap harga kedelai. Sehingga dari pengaruh ini dapat dilihat apakah PKSH efektif untuk ditetapkan atau tidak.

3. Memprediksi keseimbangan harga kedelai domestik.

Dari hasil estimasi keseimbangan harga akan diketahui pada harga berapa terjadi keseimbangan pasar.

4. Memprediksi keseimbangan kuantitas kedelai domestik

Dari hasil estimasi keseimbangan kuantitas akan diketahui pada tingka berapa kuantitas kedelai harus tersedia di pasar untuk memenuhi konsumsi dalam negeri.

BAB IV

METODE PENELITIAN

4.1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk mengevaluasi Paket Kebijakan Stabilitas Harga (PKSH) terhadap harga kedelai dan turunannya dan juga terhadap persediaan kedelai baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Metode kuantitatif yang digunakan adalah metode VAR (Vector Auto regressive), metode Partial Adjustment Model (PAM), dan Metode OLS

4.2 Identifikasi Variabel

Adapun variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Bea Masuk (BM), PPh impor (PPh I), subsidi (S), harga kedelai domestik (Pk Dm),

Definisi Operasional

Definisi masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Harga kedelai domestik (Pk Dm)
Harga kedelai domestik adalah harga kedelai yang berlaku didalam pasar domestik dalam bentuk harga per bulan dengan satuan Kg. Untuk mendapatkan harga kedelai per bulan diperoleh dengan cara merata-rata harga kedelai domestik yang sebelumnya dalam bentuk mingguan mulai dari bulan Januari tahun 2000 sampai dengan bulan Oktober tahun 2008.
2. Harga Kedelai Internasional (Pk In)
Harga Kedelai Internasional adalah harga kedelai yang berlaku didalam pasar internasional dalam bentuk harga per bulan dengan satuan Kg. Untuk mendapatkan harga kedelai per bulan diperoleh dengan cara merata-rata harga kedelai internasional yang sebelumnya dalam bentuk mingguan mulai dari bulan Januari tahun 2006 sampai dengan bulan Oktober tahun 2008.
3. Bea Masuk (BM) adalah Bea yang dikenakan atas impor kedelai. Pada bulan Januari tahun 2000 sampai dengan bulan Oktober tahun 2007, besarnya Bea Masuk adalah 5%. Selanjutnya pada bulan Januari tahun 2008 sampai dengan bulan Oktober tahun 2008, besarnya Bea Masuk menjadi 0%.

4. PPh Impor (PPh I) adalah pajak yang dipungut berkenaan dengan kegiatan dibidang impor kedelai. Pada bulan Januari tahun 2000 sampai dengan bulan Januari tahun 2008, besarnya PPh impor adalah 2,5%. Selanjutnya pada bulan Pebruari tahun 2008 sampai dengan bulan Oktober tahun 2008, besarnya PPh impor menjadi 0,5%.
5. Subsidi (S) adalah pembayaran yang diberikan oleh pemerintah kepada pengrajin tahu dan tempe sebesar Rp. 1.000,00 pada bulan April, Juli, Agustus, September, dan Oktober tahun 2008, yang membuat mereka dapat memproduksi tahu dan tempe dalam kuantitas yang lebih besar atau pada harga yang lebih murah.

4.3 Teknik Analisis.

4.3.1. Uji Stasioneritas Data

Langkah pertama yang harus dilakukan dalam estimasi model ekonomi dengan data *time series* adalah dengan menguji stasioneritas pada data atau disebut juga *stationary stochastic process*. Uji stasioneritas data ini dapat dilakukan dengan menggunakan Augmented Dickey- Fuller (ADF) pada derajat yang sama (*level* atau *different*) hingga diperoleh suatu data yang stasioner, yaitu data yang variansnya tidak terlalu besar dan mempunyai kecenderungan untuk mendekati nilai rata-ratanya (Enders, 1995).

Gujarati (2003: 817) menjelaskan bentuk persamaan uji stasioner dengan analisis ADF dalam persamaan berikut :

$$\Delta F_t = \alpha_0 + \gamma F_{t-1} + \beta_i \sum_{i=1}^p \Delta F_{t-i} + \varepsilon_t \dots\dots\dots 3.1.$$

Dimana :

- ΔF_t : Bentuk dari *first difference*
- α_0 : Intersep
- Y : Variabel yang diuji stasioneritasnya
- p : panjang lag yang digunakan dalam model
- ε_t : *error term*

Dalam persamaan tersebut diketahui bahwa hipotesis nol (H_0) menunjukkan adanya *unit root* dan hipotesis satu (H_1) menunjukkan kondisi tidak ada *unit root*. Jika dalam uji stasioneritas ini menunjukkan nilai $ADF_{\text{statistik}}$ yang lebih besar dari *Mackinnon critical value*, maka dapat diketahui bahwa data tersebut stasioner karena tidak mengandung *unit root*. Sebaliknya jika nilai $ADF_{\text{statistik}}$ kurang dari *Mackinnon critical value*, maka dapat disimpulkan data tersebut tidak stasioner pada derajat level. Dengan demikian harus

dilakukan *differencing* data untuk memperoleh data yang stasioner pada derajat yang sama di *first different* $I(1)$, yaitu dengan mengurangi data tersebut dengan data periode sebelumnya.

4.3.2. Penentuan Lag Optimal

Penentuan lag merupakan salah satu tahapan yang harus dilakukan dalam uji stasioneritas. Penentuan lag ini menunjukkan ketepatan estimasi *actual error* yaitu ketepatan hasil *lag* yang terlalu sedikit maka residual dari regresi tidak akan menampilkan proses *white noise* sehingga model tidak dapat mengestimasi *actual error* secara tepat. Akibatnya γ (koefisien Y_{t-1} dalam uji ADF) dan standar kesalahan tidak diestimasi secara baik. Namun jika memasukkan terlalu banyak *lag* maka dapat mengurangi kemampuan untuk menolak H_0 , karena tambahan parameter yang terlalu banyak akan mengurangi *degress of freedom* (Gujarati, 2003: 849).

Penentuan *lag length* optimal pada penelitian ini menggunakan metode:

$$\text{Akaike Information Criterion (AIC)} \quad : \quad -2\left(\frac{1}{T}\right) + 2(k + T)$$

$$\text{Schwarz Information Criterion (SIC)} \quad : \quad -2\left(\frac{1}{T}\right) + k \frac{\log(T)}{T}$$

$$\text{Hannan-Quinn Information Criterion (HQ)} \quad : \quad -2\left(\frac{1}{T}\right) + 2k \log\left(\frac{\log(T)}{T}\right)$$

final prediction error corection (FPE) :

$$-6\left(\frac{1}{T}\right) + 2(k + T) + \frac{k \log(T)}{T} + 2k \log\left(\frac{\log(T)}{T}\right)$$

Di mana :

l : nilai fungsi *log likelihood* yang sama jumlahnya dengan

$$-\frac{T}{2} \left(1 + \log(2\pi) + \log\left(\frac{\varepsilon''\varepsilon'}{T}\right) \right); \varepsilon''\varepsilon' \text{ merupakan } \textit{sum of squared residual}$$

T : Jumlah Observasi

k : Parameter yang Diestimasi

final prediction error corection

Dalam penelitian ini penentuan *lag* optimal menggunakan kriteria informasi *final prediction error corection* (FPE) atau jumlah dari AIC, SIC, dan HQ paling kecil di antara berbagai *lag* yang diajukan.

4.3.3. Uji Kausalitas Granger

Metode yang digunakan untuk menganalisis hubungan kausalitas antar variabel yang diamati adalah dengan uji Kausalitas Granger. Pengujian model kausalitas Granger dapat dirumuskan sebagai berikut (Gujarati, 2003: 697):

$$F_t = \sum_{j=1}^n \alpha_j F_{t-j} + \sum_{j=1}^n \beta_j P_{t-j} + u_{1t} \dots\dots\dots 3.2$$

$$P_t = \sum_{j=1}^n \gamma_j P_{t-j} + \sum_{j=1}^n \lambda_j F_{t-j} + u_{2t} \dots\dots\dots 3.3$$

Dimana :

F_t :kebijakan fiskal pada periode ke t

P_t :harga kedelai dan harga produk turunannya pada periode ke t

$\alpha_i, \beta_j, \gamma_i, \lambda_j$ = koefisien

u_{1t}, u_{2t} = *error term*

Ada 4 kasus yang dapat diinterpretasikan dari persamaan (3.2) dan (3.3) (Gujarati, 2003: 696-697) :

1. *Unidirectional causality from F to P*, artinya kausalitas satu arah dari F ke P terjadi jika koefisien *lag* F pada persamaan F_t adalah secara statistik signifikan berbeda dengan nol dan koefisien *lag* P pada persamaan P_t secara statistik sama dengan nol.
2. *Unidirectional causality from P to F*, artinya kausalitas satu arah dari P ke F terjadi jika koefisien *lag* F pada persamaan F_t adalah secara statistik sama dengan nol dan koefisien *lag* P pada persamaan P_t secara statistik signifikan berbeda dengan nol.
3. *Feedback or bilateral causality*, artinya kausalitas timbal balik yang terjadi jika koefisien *lag* pada F dan *lag* P adalah secara statistik signifikan berbeda dengan nol pada kedua persamaan F_t dan P_t diatas.
4. *Interdependence*, artinya tidak saling ketergantungan yang terjadi jika koefisien *lag* F dan *lag* P adalah secara statistik sama dengan nol pada persamaan F_t dan P_t .

Hipotesis statistik untuk pengujian kausalitas dengan menggunakan pendekatan Granger adalah :

$$H_0 : \sum_{i=1}^l \beta_{ii} = 0 \text{ artinya suatu variabel tidak mempengaruhi variabel lain}$$

$H_1 : \sum_{i=1}^I \beta_{ii} \neq 0$ artinya suatu variabel mempengaruhi variabel lainnya.

4.3.4 Partial Adjustment Model (PAM)

Salah satu model rasionalisasi adalah stock adjustment model atau partial adjustment model. Model ini berdasarkan flexible accelerator model dari terori ekonomi, yang mengasumsikan bahwa terdapat keseimbangan pada jangka panjang dari suatu variabel ekonomi. Dimana variabel tersebut digunakan untuk memproduksi output yang tetap dengan teknologi yang tetap. Untuk membuat lebih sederhana maka diasumsikan bahwa tingkat equilibrium Y^* adalah sebuah fungsi linier dengan output X . Adapun fungsi dari model ini adalah sebagai berikut:

$$Y_t^* = \beta_0 + \beta_1 X_t + u_t \dots \dots \dots 3.4$$

karena tingkat equilibrium tidak dapat langsung diobservasi maka terdapat suatu hipotesisi yang diknela dengan partial adjustment model, sebagai berikut:

$$Y_t - Y_{t-1} = \delta (Y_t^* - Y_{t-1}) \dots \dots \dots 3.5$$

dimana δ adalah $0 < \delta < 1$ dikenal sebagai koefisien adjusment dan $Y_t - Y_{t-1}$ adalah *actual change*, $(Y_t^* - Y_{t-1})$ adalah perubahan equilibrium.

Persamaan 3.2 menyatakan bahwa perubahan actual dalam capital stock dalam periode waktu t bberapaupun adalah fraksi δ dari perubahan equilibrium untuk periode tersebut. Jika $\delta = 1$, maka actual stock adalah sama dengan equilibrium stock. Sedangkan jika $\delta = 0$ maka tidak ada perubahan dari actual stock dimana pada waktu t adalah sama dengan saat observasi pada waktu sebelumnya. Mekanisme adjusment dapat ditulis sebagai berikut:

$$Y_t = \delta Y_t^* + (1 - \delta) Y_{t-1} \dots \dots \dots 3.6$$

Persamaan di atas menunjukkan bahwa actual stock pada waktu ke t adalah rata-rata tertimbang dari equilibrium stock pada waktu yang sama dan $(1 - \delta)$ menjadi tertimbng. Dengan mensubstitusi 3.2 pada 3.2 akan dihasilkan persamaan :

$$\begin{aligned} Y_t &= \delta (\beta_0 + \beta_1 X_t + u_t) + (1 - \delta) Y_{t-1} \\ &= \delta \beta_0 + \delta \beta_1 X_t + (1 - \delta) Y_{t-1} + \delta u_t \dots \dots \dots 3.7 \end{aligned}$$

Model diatas disebut mdel estimasi Partial Adjusment Model.

Persamaan 3.4 menunjukkan keseimbangan jangka panjang, sedangkan persamaan 3.7 menunjukkan fungsi permintaan jangka pendek.

4.3.5 Model Kombinasi dari *Adaptive Expectations* dan *Partial Adjustment Model*

Berdasarkan model :

$$Y_t^* = \beta_0 + \beta_1 X_t^* + u_t$$

Dimana Y_t^* adalah kuantitas equilibrium, dan X_t^* adalah harga equilibrium.

Karena Y_t^* dan X_t^* dapat didapatkan dengan menggunakan AE dan PAM maka akan dapat disusun persamaan estimasi sebagai berikut:

$$Y_t = \beta_0 \delta \gamma + \beta_1 \delta \gamma X_t + [(1 - \gamma) + (1 - \delta)] Y_{t-1} - (1 - \gamma)(1 - \delta) Y_{t-2} + [\delta u_t - \delta (1 - \gamma) u_t] \\ = \alpha_0 + \alpha_1 X_t + \alpha_2 Y_{t-1} + \alpha_3 Y_{t-2} + v_t$$

4.3.5.1 Uji t dan Uji F

Pengujian statistik untuk melihat signifikansi parameter dalam model prediksi harga ideal dengan menggunakan uji t dan uji F berikut :

a. Uji t

Fungsi uji t digunakan untuk menentukan signifikansi koefisien parameter dalam model data OLS, yang diuji secara parsial. Hipotesis untuk uji t adalah :

Hipotesis pertama:

$$H_0 : \beta_0 = 0 \text{ (Konstanta } c \text{ tidak signifikan)}$$

$$H_1 : \beta_0 \neq 0 \text{ (Konstanta } c \text{ signifikan)}$$

Hipotesis kedua:

$$H_0 : \beta_1 = 0 \text{ (Koefisien Variabel } t \text{ tidak signifikan)}$$

$$H_1 : \beta_1 \neq 0 \text{ (Koefisien Variabel } t \text{ signifikan)}$$

Hipotesis ketiga:

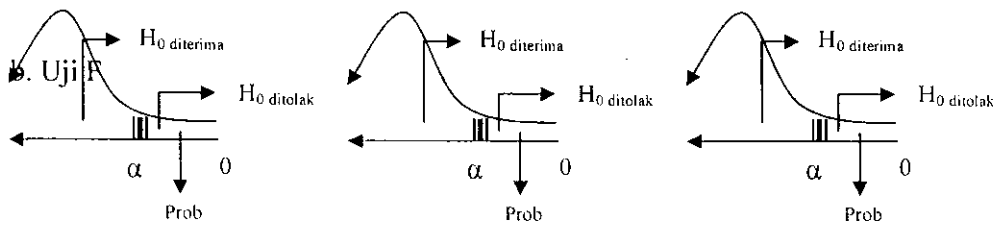
$$H_0 : \beta_2 = 0 \text{ (Koefisien Variabel } S(-1)_t \text{ tidak signifikan)}$$

$$H_1 : \beta_2 \neq 0 \text{ (Koefisien Variabel } S(-1)_t \text{ signifikan)}$$

Bila $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka H_0 tidak dapat ditolak. Artinya koefisien parameter-parameter dalam model data panel signifikan untuk digunakan.

Pengujian t-statistik juga dapat dilakukan dengan melihat nilai probabilitas (uji *p-value*). Apabila nilai probabilitas lebih kecil dari tingkat signifikansi α yang ditetapkan (berada pada daerah H_1 diterima, maka koefisien parameter dalam model signifikan untuk digunakan. Uji *p-value* tersebut didasarkan pada analisis Grafik 3 berikut:

Grafik 3.1
Uji P-Value Secara Parsial
Konstanta C, Variabel t, dan Variabel S(-1)



Pengujian F-statistik digunakan untuk menguji signifikansi dari semua variabel bebas sebagai satu kesatuan (uji signifikansi variabel bebas secara simultan). Hipotesis yang digunakan pada pengujian F-statistik adalah:

- H_0 : Semua variabel bebas pada model secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel terikat
- H_1 : Setidaknya ada satu variabel bebas pada model yang mempengaruhi variabel terikat

Berdasarkan hipotesis tersebut, maka hipotesis pengujian F-statistik adalah:

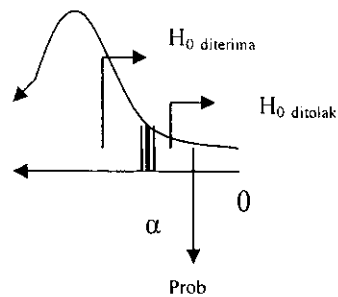
$$H_0 : \beta_0 = \beta_1 = \beta_2 = 0$$

H_1 : Setidaknya ada satu parameter yang signifikan untuk digunakan dalam model

Analisis hasil uji F-statistik terbagi menjadi dua. Pertama, apabila nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka hipotesis nol (H_0) ditolak, sehingga parameter-parameter dalam model, secara bersama-sama signifikan untuk digunakan. Kedua, apabila $F_{hitung} \leq F_{tabel}$, maka hipotesis nol (H_0) tidak dapat ditolak, sehingga parameter-parameter pada model secara bersama-sama tidak signifikan.

Uji signifikansi variabel bebas secara simultan juga dapat dilakukan dengan membandingkan nilai probabilitas (*p-value*) melalui analisis Grafik 3.2 berikut. Apabila nilai probabilitas kurang dari tingkat signifikansi α yang ditetapkan, maka hipotesis berada pada H_0 ditolak. Dengan kata lain, parameter-parameter dalam model yang diuji secara simultan, signifikan untuk digunakan.

Grafik 3.2
Uji *P-Value* Secara Simultan



BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian

5.1.1 Perkembangan Harga Kedelai Domestik

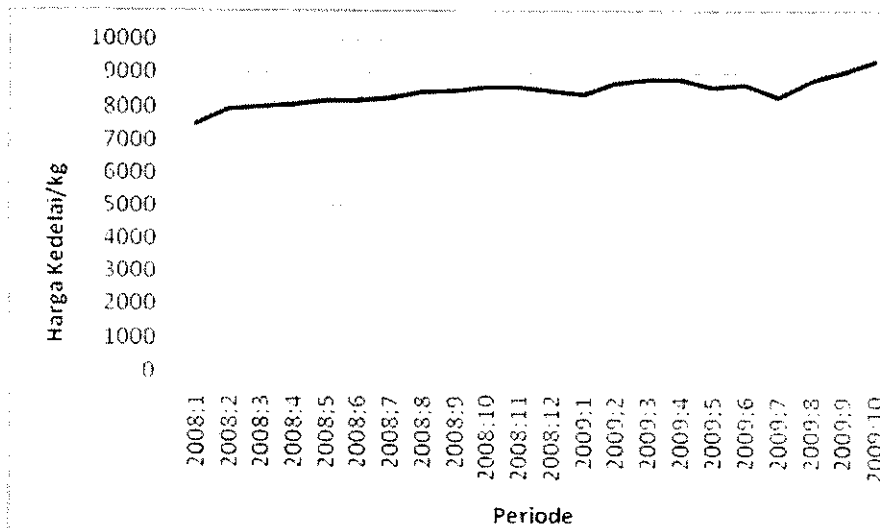
Perkembangan harga kedelai domestik dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2009 menunjukkan trend yang meningkat. Pada tahun 2000 hingga tahun 2002, perkembangan harga kedelai domestik tidak mengalami peningkatan yang berarti. Tetapi pada awal tahun 2003, harga kedelai domestik mengalami peningkatan. Harga kedelai domestik pada tahun 2000 sampai dengan tahun 2002 berada pada kisaran Rp. 1.800 sampai dengan Rp. 2.548,00.

Pada tahun 2003 hingga tahun 2005, harga kedelai domestik mengalami peningkatan. Pada tahun 2003 harga kedelai domestik berkisar antara Rp. 1.986,00 sampai dengan Rp. 2.666,00. Harga kedelai domestik terus mengalami peningkatan pada tahun 2004 yaitu dengan harga rata-rata sebesar Rp. 3.559,00. selanjutnya pada tahun 2005 harga kedelai domestik mengalami kenaikan yang cukup signifikan, yaitu dengan harga rata-rata sebesar Rp. 5.468,00.

Pada awal tahun tahun 2006 harga kedelai domestik mengalami penurunan, tetapi pada awal tahun 2007 harga kedelai domestik mengalami peningkatan. Pada tahun 2006, harga kedelai domestik berkisar antara Rp. 4.712,00 sampai dengan Rp. 4.872,00. Pada tahun 2007, harga kedelai domestik mengalami kenaikan dengan harga rata-rata sebesar Rp. 5.209,00.

Selanjutnya pada tahun 2008. harga kedelai domestik mengalami kenaikan yang cukup signifikan, yaitu dengan harga rata-rata sebesar Rp. 8.187,00. Kenaikan ini terus terjadi sampai tahun 2009. Di awal tahun 2009 harga kedelai mencapai Rp 8.401. Nilai ini terus meningkat sampai pada bulan Oktober 2009 harga kedelai mencapai Rp 9.384. Perkembangan harga kedelai domestik ini dapat dilihat pada grafik 4.1.

Grafik 5.1
Perkembangan Harga kedelai Domestik

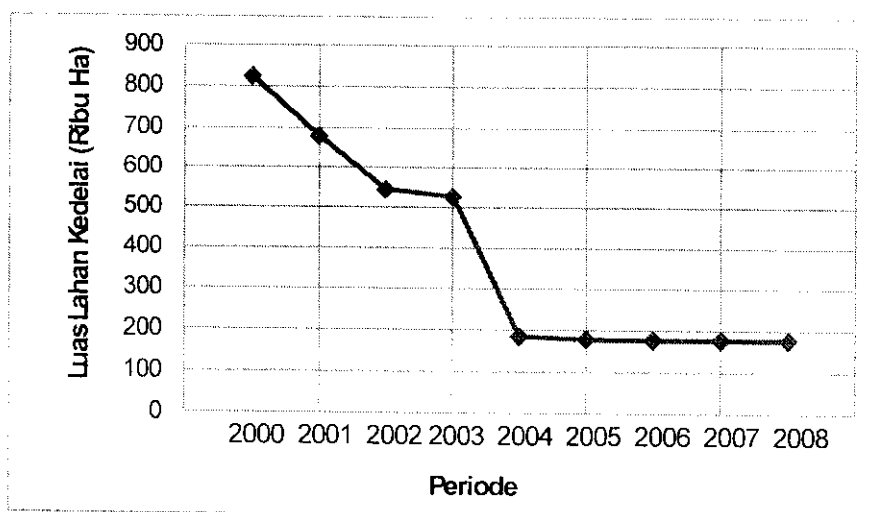


Sumber: Departemen Keuangan, 2008

5.1.2 Perkembangan Luas Lahan Kedelai

Perkembangan luas lahan kedelai dari tahun 2000 hingga tahun 2008 menunjukkan adanya penurunan. Pada tahun 2000 luas lahan kedelai adalah seluas 824,5 ribu Ha. Selanjutnya pada tahun 2001 luas lahan kedelai mengalami penurunan menjadi 678,8 ribu Ha. Pada tahun 2002 dan 2003 luas lahan kedelai mengalami penurunan yang hampir sama, yaitu seluas 544,5 ribu Ha pada tahun 2002 dan seluas 526,7 ribu Ha pada tahun 2003. Selanjutnya pada tahun 2004 hingga tahun 2008 terjadi penurunan yang cukup drastis terhadap luas lahan kedelai. Pada tahun 2004 luas lahan kedelai adalah seluas 184,5 ribu Ha, pada tahun 2005 luas lahan kedelai adalah seluas 178,3 ribu Ha, pada tahun 2006 luas lahan kedelai adalah seluas 176,5 ribu Ha, pada tahun 2007 luas lahan kedelai adalah seluas 176,9 ribu Ha, dan pada tahun 2008 luas lahan kedelai adalah seluas 176,2 ribu Ha. Perkembangan luas lahan kedelai secara rinci dapat dilihat pada grafik 4.2.

Grafik 5.2.
Perkembangan Luas Lahan Kedelai



Sumber: BPS, 2000 – 2008

5.1.5. Pasokan Kedelai Domestik dan Kedelai Impor

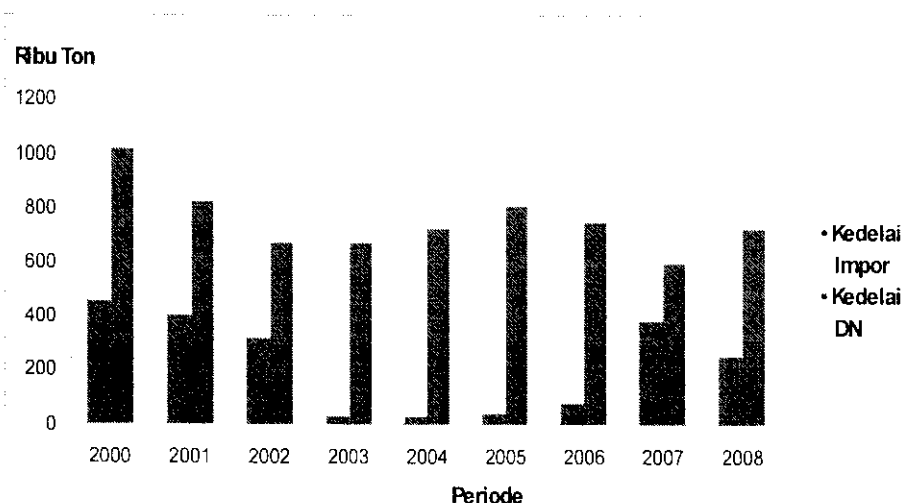
Pasokan kedelai domestik Indonesia dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2008 cenderung berfluktuatif. Pada tahun 2000 pasokan komoditi kedelai di Indonesia sebesar 1.017,6 ribu ton. Pada tahun 2000 sampai dengan tahun 2003 pasokan kedelai di Indonesia terus mengalami penurunan. Pasokan kedelai tahun 2000 sebesar 1.017,6 ribu ton turun menjadi 826,9 ribu ton pada tahun 2001, 673,1 ribu ton pada tahun 2002, dan 673,1 ribu ton pada tahun 2003. Selanjutnya pada tahun 2004 dan tahun 2005 pasokan kedelai di Indonesia mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2004 sebesar 723,5 ribu ton dan pada tahun 2005 mengalami peningkatan sebesar 808,4 ribu ton. pasokan kedelai kembali mengalami penurunan pada tahun 2006 yaitu sebesar 749,0 ribu ton. Selanjutnya pada tahun 2008 pasokan kedelai mengalami peningkatan yaitu sebesar 723,5 ribu ton.

Pasokan kedelai di Indonesia yang berasal dari impor relatif kecil. Impor kedelai di Indonesia dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2008 juga cenderung berfluktuatif. Pada tahun 2000 impor kedelai di Indonesia sebesar 451,06 ribu ton dan terus mengalami penurunan yang sangat tajam sampai dengan tahun 2003, yaitu menjadi hanya sebesar 27,43 ribu ton. Selanjutnya dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2006 impor kedelai di Indonesia mengalami peningkatan yang relatif kecil, yaitu dari 29,43 ribu ton pada tahun 2004 menjadi sebesar 78 ribu ton pada tahun 2006. Pada tahun 2007 impor kedelai mengalami peningkatan yaitu sebesar 380,3 ribu ton. Selanjutnya pada tahun 2008 impor kedelai mengalami

penurunan yaitu sebanyak 249,5 ribu ton. Pasokan kedelai domestik dan kedelai impor dapat dilihat pada grafik 4.5.

Grafik 5.3.

Pasokan Kedelai Domestik dan Kedelai Impor



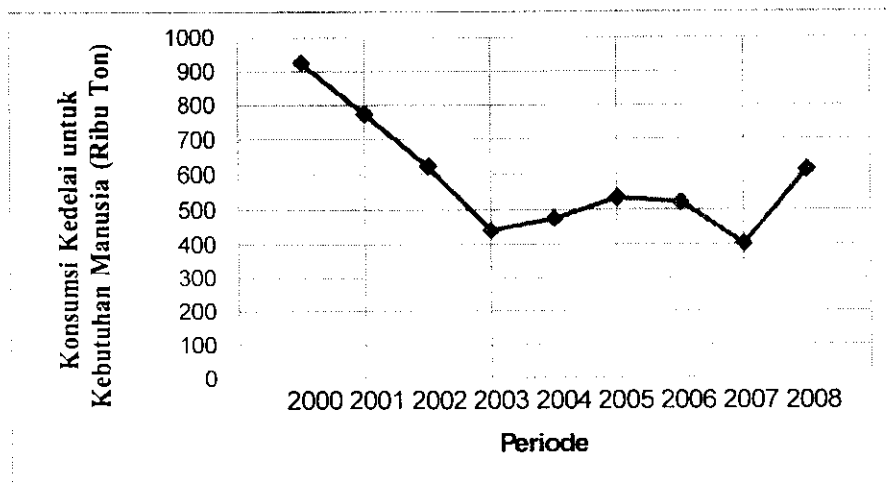
Sumber: BPS, 2000-2008

5.1.6 Perkembangan Konsumsi dan Produksi Kedelai Dalam Negeri

Konsumsi kedelai untuk memenuhi kebutuhan manusia dari tahun 2000 hingga tahun 2008 cenderung berfluktuatif. Pada tahun 2000 hingga tahun 2003 konsumsi kedelai mengalami penurunan, yaitu pada tahun 2000 konsumsi kedelai sebanyak 925 ribu Ton, pada tahun 2001 konsumsi kedelai sebanyak 772 ribu Ton, dan pada tahun 2002 konsumsi kedelai sebanyak 622 ribu Ton. Selanjutnya pada tahun 2004 dan tahun 2005 konsumsi kedelai mengalami peningkatan, yaitu pada tahun 2004 konsumsi kedelai sebanyak 474 ribu Ton dan pada tahun 2005 sebanyak 533 ribu Ton. Pada tahun 2006 dan 2007 konsumsi kedelai mengalami penurunan, yaitu pada tahun 2006 konsumsi kedelai sebanyak 521 ribu Ton dan pada tahun 2007 sebanyak 400 ribu Ton. Selanjutnya pada tahun 2008, konsumsi kedelai mengalami peningkatan, yaitu sebanyak 612 ribu Ton. Secara rinci perkembangan konsumsi kedelai dapat dilihat pada grafik 4.6

Grafik 5.4.

Konsumsi Kedelai

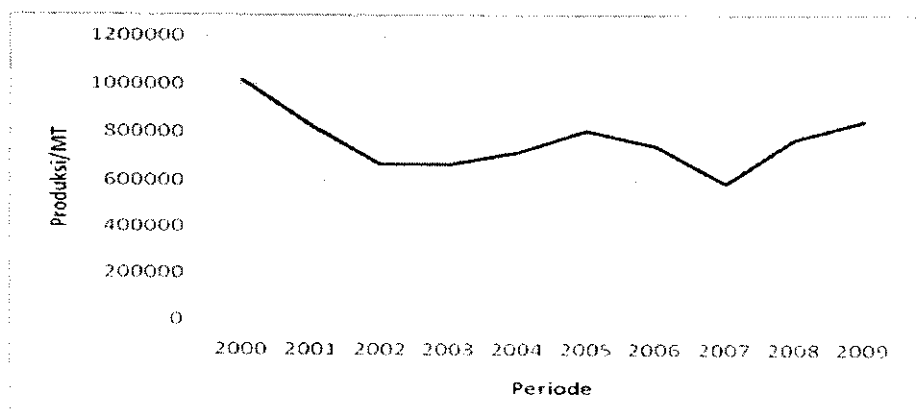


Sumber: BPS, 2000-2008

Produksi kedelai dalam negeri berfluktuasi dari tahun 2000 sampai 2009. Pada tahun 2000 produksi kedelai di Indonesia sebesar 1.017.634 MT. Nilai ini turun 19 % pada tahun 2001, dimana pada tahun ini besarnya produksi kedelai sebesar 826.932 MT. Produksi kedelai terus menurun sampai pada tahun 2003, produksi kedelai mencapai 671.600 MT. Pada tahun 2004, produksi kedelai naik menjadi 723.483 MT dan 808.353 MT di tahun 2005. Akan tetapi nilai ini menurun menjadi 747.611 di tahun 2006, dan 592.634 MT di tahun 2007. Pada dua tahun terakhir nilai produksi kedelai mencapai 776.000 MT di tahun 2008, dan 850.228 MT di tahun 2009.

Grafik 5.5.

Produksi Kedelai di Indonesia



Sumber: BPS, 2000-2008

5.2 Hasil Analisis dan Pengujian Hipotesis

5.2.1 Uji Stasioneritas Data pada variabel Harga Kedelai dan PKSII

Uji stasioneritas *Augmented Dickey-Fuller* (ADF) dilakukan pada tingkat *level-trend and intercept*. Dari hasil uji tersebut dapat diketahui bahwa hampir semua variabel yang diajukan tidak stasioner di tingkat *level-trend and intercept*. Hanya variabel subsidi saja yang stasioner di tingkat *level-trend and intercept* di tingkat kesalahan 1%. Hasil uji stasioneritas data pada tingkat level untuk model 1 dan model 2 dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.1.

Tabel 5.1.

Hasil Uji ADF : pada Level

Variabel	ADF t- Statistik	MacKinnon Critical Value		
		1%	5%	10%
BM	-0.466127	-3.487046	-2.886290	-2.580046
PPh I	-0.452517	-3.487046	-2.886290	-2.580046
S*	-6.337522	-3.487046	-2.886290	-2.580046
Harga Kedelai	-0.060538	-3.487046	-2.886290	-2.580046

Catatan: * Signifikan pada 1%
 ** Signifikan pada 5%
 *** Signifikan pada 10%

Oleh karena itu, perlu dilakukan uji akar unit kembali pada tingkat selanjutnya yaitu *first different-trend and intercept*. Pada tingkat *first difference-trend and intercept* seluruh variabel telah stasioner dengan tingkat signifikansi pada $\alpha = 1\%$. Hal ini dapat diketahui dari nilai $ADF_{\text{Statistik}}$ seluruh variabel yang lebih besar dari nilai *MacKinnon critical value*-nya pada derajat kesalahan 1%. Dengan demikian, seluruh variabel yang diajukan dapat digunakan untuk pengujian regresi pada tingkat *first different-trend and intercept*. Hasil pengujian akar unit pada tingkat *first different-trend and intercept* dari seluruh variabel yang diajukan dapat dilihat pada tabel 4.2.

Tabel 5.2.

Hasil Uji ADF : pada *First Different*

Variabel	ADF t-Statistik	MacKinnon Critical Value		
		1%	5%	10%
BM*	-10.77033	-3.487550	-2.886509	-2.580163
PPh *	- 10.77033	-3.487550	-2.886509	-2.580163
S*	-11.83216	-3.488063	-2.886732	-2.580281
Pk Dm*	-10.53314	-3.487550	-2.886509	-2.580163

Catatan: * Signifikan pada 1%

** Signifikan pada 5%

*** Signifikan pada 10%

5.2.2. Penentuan *Lag Optimal* pada Model PKSH terhadap Harga Kedelai

Pemilihan lag length pada penelitian ini didasarkan pada hasil yang direkomendasikan metode *Final Prediction Error* (FPE). Pada tabel 4.3 dapat dilihat bahwa lag optimal yang direkomendasikan untuk model bea masuk dan harga kedelai serta subsidi dan harga kedelai adalah lag 1. Sedangkan pada model PPh impor dan harga kedelai, FPE merekomendasikan lag ke 2.

Tabel 5.3.

Hasil Pengujian *Lag Length Optimal*

Model	LR	FPE	AIC	SC	HQ	HASIL LAG OPTIMAL
BM dan Pk	1	1	1	1	1	1
PPH dan Pk	2	2	2	2	2	2
Subsidi dan Pk	7	1	1	1	1	1

Keterangan : * menunjukkan *lag* yang direkomendasikan

5.2.3 Uji Kausalitas *Granger*

Hasil uji kausalitas granger antara Bea Masuk dan harga kedelai beserta harga produk turunannya dapat dilihat pada tabel 4.4. Dari tabel 4.4 tersebut dapat dilihat bahwa antara Bea Masuk dan harga kedelai beserta produk turunannya menunjukkan hubungan *interdependence*. Artinya, Bea Masuk tidak berpengaruh signifikan terhadap harga kedelai. Dan sebaliknya harga kedelai beserta harga produk turunannya juga tidak berpengaruh terhadap kebijakan bea masuk.

Tabel 5.4.

Hasil Uji Kausalitas *Granger* antara Bea Masuk dan Harga Kedelai

Null Hypothesis	Obs	F-Statistic	Probability
BM does not Granger Cause LPK	117	0.16436	0.68593
LPK does not Granger Cause BM		2.58316	0.11077
PPH does not Granger Cause LPK	116	0.20716	0.81320
LPK does not Granger Cause PPH		13.6294	5.1E-06
SUBSIDI does not Granger Cause LPK	117	0.00096	0.97537
LPK does not Granger Cause SUBSIDI		3.24836	0.07414

Catatan: * signifikan pada 1%
 ** signifikan pada 5%
 *** signifikan pada 10

Sedangkan pada Hasil uji kausalitas granger antara PPh Impor dan harga kedelai didapatkan hasil bahwa hubungan ke dua variabel tersebut adalah *Unidirectional causality from P to F*. Artinya, terjadi hubungan satu arah dari harga kedelai terhadap PPh impor. Dari tabel 4.4 dapat diketahui bahwa harga kedelai dan harga tempe berpengaruh signifikan terhadap PPh Impor. Harga kedelai berpengaruh signifikan terhadap PPh Impor dengan tingkat signifikansi 1%.

Selanjutnya, hasil uji kausalitas granger antara subsidi dan harga kedelai menunjukkan bahwa juga terjadi hubungan *Unidirectional causality from P to F*. Artinya, terjadi hubungan satu arah dari harga kedelai beserta produk turunannya ke subsidi. Dari tabel 4.4 dapat diketahui bahwa harga kedelai berpengaruh signifikan terhadap subsidi dengan tingkat signifikansi 10%.

5.2.4 Estimasi Pengaruh PKSH terhadap Harga Kedelai.

Berdasarkan hasil estimasi PAM didapatkan hasil bahwa pada jangka pendek PKSH tidak efektif diterapkan untuk menurunkan harga kedelai. Pada jangka pendek didapatkan bahwa koefisien bea masuk adalah -0.02. Koefisien ini signifikan pada tingkat α 1% dengan probabilitas 0.000. Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa ketika bea masuk diturunkan 1% maka harga kedelai akan naik 0.02%. Jadi dapat disimpulkan bahwa, dengan adanya PKSH berupa penurunan bea masuk dari 5% menjadi 0% akan tetap menaikkan harga kedelai sebanyak 0.1%. Sehingga dapat dikatakan bahwa adanya penghapusan bea masuk tidak dapat menurunkan harga kedelai. Hasil estimasi dapat dilihat pada tabel 4.5.

Tabel 5.5.**Hasil Uji Estimasi Pengaruh Bea Masuk dan Harga Kedelai**

Dependent Variable: LPK

Method: Least Squares

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
BM	-0.019471	0.004068	-4.785833	0.0000
LPK(-1)	0.828576	0.032670	25.36203	0.0000
C	1.567140	0.295160	5.309460	0.0000
R-squared	0.999948	Mean dependent var		8.702151
Adjusted R-squared	0.999947	S.D. dependent var		8.274232
S.E. of regression	0.059997	Akaike info criterion		-2.763732
Sum squared resid	0.410361	Schwarz criterion		-2.692907
Log likelihood	164.6783	F-statistic		2042.711
Durbin-Watson stat	1.682211	Prob(F-statistic)		0.000000

Sama halnya dengan bea masuk, penurunan PPh impor pada jangka pendek juga tidak dapat menurunkan harga kedelai. Dari hasil estimasi didapatkan bahwa koefisien PPh impor sebesar -0.03%. Nilai ini signifikan pada α 1%, dengan probabilitas 0.000. Hal ini berarti jika PPh impor diturunkan 1% maka harga kedelai akan tetap naik 0.03%. Jadi dapat disimpulkan bahwa, dengan adanya PKSH berupa penurunan PPh Impor dari 2. 5% menjadi 0.5% akan tetap menaikkan harga kedelai sebanyak 0.06%. Sehingga dapat dikatakan bahwa adanya penurunan PPh Impor tetap tidak dapat menurunkan harga kedelai pada jangka pendek. Hasil estimasi dapat dilihat pada tabel 4.6.

Tabel 5.6.**Hasil Uji Estimasi Pengaruh antara PPh Impor dan Harga Kedelai**

Dependent Variable: LPK
Method: Least Squares

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
PPH	-0.029030	0.017325	-1.675590	0.0966
LPK(-1)	0.875593	0.066827	13.10242	0.0000
C	1.149132	0.612853	1.875053	0.0633
R-squared	0.999986	Mean dependent var	8.944368	
Adjusted R-squared	0.999986	S.D. dependent var	14.89171	
S.E. of regression	0.055408	Akaike info criterion	-2.922867	
Sum squared resid	0.349989	Schwarz criterion	-2.852042	
Log likelihood	173.9877	F-statistic	637.0908	
Durbin-Watson stat	1.805215	Prob(F-statistic)	0.000000	

Sedangkan, pemberian subsidi juga tidak dapat menurunkan harga kedelai. Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil estimasi PAM. Dari estimasi tersebut dihasilkan bahwa koefisien subsidi sebesar -0.000004. Akan tetapi koefisien ini tidak signifikan pada tingkat α berapapun. Hal ini berarti bahwa subsidi tidak berpengaruh signifikan pada harga kedelai. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemberian subsidi sebesar Rp1000 tidak dapat mempengaruhi dan menurunkan harga kedelai. Hasil estimasi dapat dilihat pada tabel 4.7

Tabel 5.7.

Hasil Uji Estimasi Pengaruh antara Subsidi dan Harga Kedelai

Dependent Variable: LPK
Method: Least Squares

Variable	Coefficien t	Std. Error	t-Statistic	Prob.
SUBSIDI	-3.77E-06	2.84E-05	-0.132608	0.8947
LPK(-1)	0.999794	0.009504	105.1979	0.0000
C	0.015935	0.078075	0.204093	0.8386
R-squared	0.990555	Mean dependent var	8.239902	
Adjusted R-squared	0.990389	S.D. dependent var	0.548578	
S.E. of regression	0.053779	Akaike info criterion	-2.982555	
Sum squared resid	0.329710	Schwarz criterion	-2.911730	
Log likelihood	177.4795	F-statistic	5977.997	
Durbin-Watson stat	1.972229	Prob(F-statistic)	0.000000	

Selain melihat pengaruh PKS_H terhadap harga kedelai, dapat juga dicari harga keseimbangan baik pada jangka pendek dan jangka panjang. Pada model pengaruh bea masuk pada harga kedelai didapatkan bahwa dengan adanya penurunan bea masuk keseimbangan harga pada jangka pendek adalah Rp 8484.536. sedangkan pada jangka panjang sebesar Rp 9338.433 Selanjutnya, adanya kebijakan penurunan PPh Impor dari 2.5% menjadi 0.5% keseimbangan harga kedelai pada jangka pendek sebesar Rp 8416.90 dan jangka panjang sebesar Rp 9138.05. Dan yang terakhir, pada kebijakan pemberian subsidi dihasilkan keseimbangan harga jangka pendek sebesar Rp 8434.78. Akan tetapi pada jangka panjang, keseimbangan harga kedelai karena adanya PKS_H subsidi tidak dapat dihasilkan, karena pada dasarnya koefisien paramater pada jangka pendek tidak signifikan. Keseimbangan harga kedelai pada jangka pendek dan jangka panjang akibat adanya PKS_H dapat dilihat pada tabel 4.8.

Tabel 5.8

Keseimbangan Harga Kedelai Jangka Pendek dan Jangka Panjang

PKS _H	KESEIMBANGAN	
	JANGKA PENDEK	JANGKA PANJANG
Bea Masuk	Rp 8484.536	Rp 9338.433
PPh Impor	Rp 8416.90	Rp 9138.05
Subsidi	Rp 8434.78	Rp -

5.2.5 Hasil Estimasi Kuantitas Produksi Equilibrium Kedelai

Berdasarkan estimasi antara harga dan kuantitas kedelai diperoleh hasil bahwa harga mempunyai pengaruh positif terhadap kuantitas produksi kedelai di Indonesia. Dari hasil estimasi diperoleh bahwa koefisien harga adalah 0.18 dan nilai ini signifikan pada tingkat kesalahan 10%. Hal ini berarti bahwa ketika harga naik 1% maka kuantitas produksi kedelai akan naik 18%. Dari estimasi ini dapat dihasilkan keseimbangan kuantitas produksi equilibrium pada jangka pendek dan jangka panjang. Pada jangka panjang diperoleh keseimbangan sebesar 4.221.430 Ton

Tabel 5.10

Hasil Estimasi Harga dan Kuantitas Produksi Kedelai Dalam Negeri

Dependent Variable: LQS				
Method: Least Squares				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LHARGA	-0.643096	0.099972	1.818623	0.0815
LQS(-1)	-0.175580	0.173132	0.998796	0.0000
LQS(-2)	0.362387	0.214589	-0.823675	0.00000
C	10.75164	6.387588	1.683208	0.1053
Weighted Statistics				
R-squared	0.999983	Mean dependent var	13.58951	
Adjusted R-squared	0.999981	S.D. dependent var	32.49446	
S.E. of regression	0.140242	Akaike info criterion	-0.959325	
Sum squared resid	0.472030	Schwarz criterion	-0.769011	
Log likelihood	17.43056	F-statistic	9.996939	
Durbin-Watson stat	1.586914	Prob(F-statistic)	0.000184	

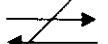
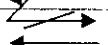
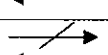
5.3 Pembahasan

5.3.1 Pembahasan Model Kausalitas

Antara Bea Masuk dan harga kedelai beserta turunannya mempunyai hubungan *Interdependence*. Artinya tidak terjadi hubungan antara Bea Masuk dan harga kedelai. Meskipun terjadi kenaikan harga kedelai beserta turunannya tidak akan mempengaruhi besarnya Bea Masuk. Begitu juga sebaliknya, besarnya Bea Masuk tidak akan mempengaruhi harga kedelai beserta turunannya. Hubungan kausalitas antara Bea Masuk dan harga kedelai beserta turunannya dapat dilihat pada tabel 4.9.

Tabel 5.10

Hubungan Kausalitas antara Bea Masuk dan Harga Kedelai beserta turunannya

Bea Masuk		P Kedelai
PPh Impor		P Kedelai
Subsidi		P kedelai

Antara PPh impor dan harga kedelai beserta turunannya mempunyai hubungan *Unidirectional causality from P to F*. Artinya terjadi hubungan satu arah dari harga kedelai beserta produk turunannya ke PPh impor. Apabila melihat hubungan kausalitas antara PPh impor dan harga kedelai, dapat dikatakan bahwa Paket Kebijakan Stabilitas Harga berupa penurunan PPh impor dari 2,5% menjadi 0,5% yang dikeluarkan oleh pemerintah bersifat reaktif. Artinya, pemerintah baru mengeluarkan Paket Kebijakan Stabilitas Harga berupa penurunan PPh impor dari 2,5% menjadi 0,5% pada saat terjadi kenaikan terhadap harga kedelai. Hubungan kausalitas antara PPh impor dan harga kedelai beserta turunannya dapat dilihat pada tabel 4.9

Kebijakan subsidi juga bersifat reaktif terhadap harga kedelai. Antara subsidi dan harga kedelai beserta turunannya mempunyai hubungan *Unidirectional causality from P to F*. Artinya terjadi hubungan satu arah dari harga kedelai beserta turunannya ke subsidi. Terdapat dua hubungan *Unidirectional causality from P to F*. Artinya, apabila terjadi kenaikan terhadap harga kedelai akan berpengaruh terhadap besarnya subsidi. Jadi pemerintah baru mengeluarkan Paket Kebijakan Stabilitas Harga berupa pemberian subsidi ketika terjadi kenaikan terhadap harga kedelai beserta produk turunannya. Hubungan kausalitas antara subsidi dan harga kedelai beserta turunannya dapat dilihat pada tabel 4.9.

5.3.2 Pembahasan Model PKSH

Bea Masuk terhadap harga kedelai dan Bea Masuk terhadap harga tahu tidak mempunyai pengaruh baik dalam jangka panjang maupun dalam jangka pendek. Artinya, dengan adanya penghapusan Bea Masuk dari 5% menjadi 0% tidak dapat menurunkan harga kedelai Berdasarkan pengaruh antara Bea Masuk terhadap harga kedelai dapat dikatakan bahwa Paket Kebijakan Stabilitas Harga berupa penghapusan Bea Masuk tidak

efektif dalam menurunkan harga kedelai. Hal tersebut dikarenakan dengan adanya penghapusan Bea Masuk tidak berpengaruh terhadap harga kedelai dalam jangka pendek.

PPh impor terhadap harga kedelai pengaruh dalam jangka pendek. Artinya, dengan adanya penurunan terhadap PPh impor dari 2,5% menjadi 0,5% tidak dapat menurunkan harga kedelai. Berdasarkan pengaruh antara PPh impor terhadap harga kedelai beserta produk turunannya dapat dikatakan bahwa Paket Kebijakan Stabilitas Harga berupa penurunan PPh impor dari 2,5% menjadi 0,5% tidak efektif dalam menurunkan harga kedelai. Hal tersebut dikarenakan dengan adanya penurunan PPh impor dari 2,5% menjadi 0,5% tidak berpengaruh terhadap harga kedelai dalam jangka pendek.

Selanjutnya, antara subsidi terhadap harga kedelai beserta produk turunannya tidak mempunyai pengaruh baik dalam jangka pendek. Artinya, pemberian subsidi sebesar Rp. 1.000,00 kepada pengrajin tahu dan tempe tidak dapat menurunkan harga produk turunan dari kedelai yaitu harga tahu dan harga tempe.

Berdasarkan pengaruh antara subsidi terhadap harga kedelai beserta produk turunannya dapat dikatakan bahwa Paket Kebijakan Stabilitas Harga berupa pemberian subsidi terhadap pengrajin tahu dan tempe sebesar Rp. 1.000,00 tidak efektif dalam menurunkan harga produk turunan dari kedelai yaitu harga tahu dan tempe. Hal tersebut dikarenakan dengan adanya pemberian subsidi terhadap pengrajin tahu dan tempe tidak mempunyai pengaruh terhadap harga kedelai beserta produk turunannya baik dalam jangka panjang maupun dalam jangka pendek.

Selain itu, dengan adanya importir yang memotong jalur distribusi kedelai membuat harga kedelai terus mengalami kenaikan. Importir memotong jalur distribusi kedelai dengan menyalurkan kedelai langsung ke pengrajin. Hal tersebut dilakukan para importir untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Menurut Departemen Keuangan (2008), untuk transmisi Paket Kebijakan Stabilitas Harga pada komoditi kedelai seharusnya importir menyalurkan ke distributor dulu. Selanjutnya distributor akan menyalurkan kedelai tersebut ke grosir dan pengrajin tahu atau tempe.

Struktur pasar kedelai yang berbentuk oligopoli menyebabkan harga kedelai sulit untuk dikendalikan. Berdasarkan hasil survey Badan Kebijakan Fiskal (2008), pasar kedelai di Indonesia dikuasai oleh empat perusahaan besar. Pertama, P.T. Gerbang Cahaya Utama. Kedua, P.T. Hukum Cipta Abadai. Ketiga, P.T. Gunung Sewu. Keempat, P.T. Cargill. Sehingga empat perusahaan tersebut dapat mempermainkan harga kedelai meskipun pemerintah telah mengeluarkan Paket Kebijakan Stabilitas Harga.

Selain itu, yang menyebabkan terjadinya kenaikan harga kedelai domestik meskipun pemerintah telah mengeluarkan PKSH, adalah peran dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang kurang efektif. Seharusnya KPPU sebagai suatu badan yang bertugas untuk mengawasi persaingan usaha mampu menjaga stabilitas harga kedelai domestik dari persaingan usaha yang tidak sehat. Persaingan usaha yang tidak sehat terjadi pada komoditi kedelai, dimana pasar kedelai domestik dikuasai oleh empat perusahaan besar yaitu P.T. Gerbang Cahaya Utama, P.T. Hukum Cipta Abadai, P.T. Gunung Sewu, dan P.T. Cargill. Selain itu, terjadinya pemotongan jalur distribusi kedelai yang dilakukan oleh importir merupakan suatu persaingan usaha yang tidak sehat. Hal ini mengindikasikan bahwa tugas dari KPPU sebagai pengawas persaingan usaha tidak efektif.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

1. Uji Kausalitas Granger menunjukkan adanya hubungan *Interdependence* dan *Unidirectional causality from P to F*. hubungan *Interdependence* terdapat pada harga kedelai dan bea masuk. Sedangkan hubungan *Unidirectional causality from P to F* ditemukan pada harga kedelai dan PPh impor serta harga kedelai dan subsidi. Artinya, PKSH yang dikeluarkan oleh pemerintah adalah kebijakan yang bersifat reaktif. Pemerintah baru mengeluarkan PKSH setelah terjadi kenaikan harga kedelai.
2. Tidak semua variabel PKSH (Bea Masuk, PPh impor, dan subsidi) mempunyai pengaruh terhadap variabel harga kedelai. Hanya variabel Bea Masuk dan PPh Impor yang mempunyai pengaruh dalam jangka pendek dan jangka panjang terhadap harga kedelai. Akan tetapi kedua PKSH tersebut tidak dapat menurunkan harga kedelai. Sedangkan subsidi tidak mempunyai pengaruh baik dalam jangka panjang maupun dalam jangka pendek terhadap harga kedelai. Hal ini menunjukkan bahwa PKSH yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak efektif karena tidak dapat menurunkan harga kedelai.
3. Harga kedelai keseimbangan pada jangka pendek saat diterapkan PKSH adalah berkisar Rp 8.445,00. Sedangkan harga kedelai keseimbangan pada jangka panjang adalah Rp. 9238,00. Keseimbangan kuantitas jangka panjang dihasilkan 4.221.430 Ton

Saran

Saran yang dapat diberikan penulis dengan adanya penelitian ini adalah:

1. PKSH yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk menstabilkan harga kedelai dan produk turunannya tidak efektif. PKSH yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak menyentuh sisi produksi sama sekali. Hendaknya kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah bukan saja dalam hal menstabilkan harga kedelai. Tetapi agar lebih menguntungkan petani dalam negeri, masalah permodalan, pengadaan benih, serta bantuan untuk meminimalkan biaya produksi akan komoditi kedelai akan sangat membantu para petani kedelai dalam mengembangkan produksi kedelai. Dengan

semakin berkembangnya produksi kedelai dalam negeri, diharapkan dapat menstabilkan harga kedelai domestik dan mengurangi ketergantungan akan kedelai impor.

2. Pemerintah harus melakukan pengawasan terhadap pendistribusian kedelai dari importir sampai ke pengrajin tahu dan tempe. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari adanya pemotongan jalur distribusi kedelai yang dilakukan oleh importir kedelai.
3. Untuk menghindari permainan harga kedelai yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar seperti P.T. Gerbang Cahaya Utama, P.T. Hukum Cipta Abadai, P.T. Gunung Sewu, dan P.T. Cargill. Pemerintah bisa menaggulangi dengan meningkatkan peran serta Bulog dalam menstabilkan harga kedelai beserta produk turunannya. Meski sudah berubah menjadi Perum, Bulog masih melaksanakan fungsi *public service obligation* (PSO). Undang-Undang (UU) No 7/1996 tentang Pangan, mengamanatkan agar Bulog tetap menjalankan tugas logistik di bidang pengadaan, penyimpanan, dan penyaluran beras, gula, kedelai, dan jagung sebagai komoditas pangan pokok. Ada lima tugas publik Bulog, yaitu, menjamin harga pembelian pemerintah (HPP), stabilisasi harga, penyaluran beras untuk keluarga miskin (raskin), mengelola stok pangan nasional, dan promosi ekspor. Tugas tersebut tidak pernah dihilangkan, bahkan makin diperkuat dengan manajemen baru, karena itu, perlu optimalisasi peran Bulog dalam menjaga stabilitas harga komoditas kedelai tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, Lincoln. 1999. *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta
- Badan Pusat Statistik. 2000-2007. *Statistik Indonesia*. Jakarta: BPS
- Badan Pusat Statistik 2000-2007. "*Statistik Perdagangan Luar Negeri Indonesia*". *Impor Katalog BPS: 8107*. Jilid Pertama. Jakarta : BPS
- Badan Pusat Statistik. 2008. "*Indikator Ekonomi*". *Buletin Statistik Bulanan Edisi April 2008*. Jakarta : BPS
- Blanchard, Oliver. 2003. *Macroeconomics*. New Jersey: Prentice Hall.
- Choir, A. 2008. "Kinerja Ekonomi 2007, Kebijakan Lepas Tangan Mendominasi". Available at: <http://www.suara karya.com>.
- Depkeu. 2008. "Data Pokok APBN-P 2007 & APBN-P 2008 RI".
- Depkeu. 2008. "Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2008 Republik Indonesia".
- Depkeu. 2008. "Nota Keuangan dan Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perubahan atas Undang-Undang No.45 Tahun 2007 tentang Anggaran dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008 Republik Indonesia".
- Gujarati, Damodar N. 1995. *Basic Econometrics*. Singapore: McGraw-Hill.
- Lestari, Dewanti. 2008. "Kapan Kebijakan Pemerintah Berpihak pada Petani Kedelai". Available at: <http://www.antara.net.id>.
- Mankiw, N. Gregory. 2003. *Teori Makro Ekonomi*. Edisi Kelima. Terjemahan. Jakarta: Erlangga.
- Michael, Todaro. 2004. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Edisi 8. Erlangga: Jakarta.
- Munawir, S. 2003. *Pajak Penghasilan*. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta
- Nuryanti, Sri dan Kustiari. 2008. *Meningkatkan Kesejahteraan Petani Kedelai dengan Kebijakan Tarif Optimal*. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian.
- Rosyidi, Suherman. 2004. *Pengantar teori ekonomi*. Edisi baru. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada

- Subiyantoro,heru dan Riphath Singgih.2004.*Kebijakan Fiskal pemikiran konsep dan Implementasi*.Edisi1.Jakarta: Kompas
- Sukirno, S. 2000. *Pengantar Teori Makro Ekonomi*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- 2004.*Pengantar Teori Makro Ekonomi*. Edisi Ketiga. Jakarta : PT Rajagrafindo Persada.
- Samuelson, Paul A dan William D.Nordhaus. 2001. *Ilmu Makroekonomi*. Edisi Tujuh Belas. Terjemahan. Jakarta: PT Media Global Edukasi.
- Suparmoko. 2003. *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktik*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- SBM, Nugroho. 2008. *Solusi Kenaikan Harga Kedelai*. Semarang : Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Diponegoro
- Widarjono, A. 2005. *Ekonometrika : Teori dan Aplikasi untuk Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta : Fakultas Ekonomi UII
- Wulansari, Dyah. 2008.*Laporan Akhir Penyusunan Model Instrumen Fiskal dalam Stabilitas Kebutuhan Pokok*. Surabaya: Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Airlangga